

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 69 ayat 1, menyatakan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD), serta pasal 71 ayat 2 yang menyatakan bahwa Kepala Daerah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2016 disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 dan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019.

B. DASAR HUKUM

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2016, adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950, yang ditetapkan pada tanggal 2 Pebruari 1950, merupakan gabungan dari Pemerintahan Daerah Karisidenan Surabaya, Madura, Besuki, Malang, Kediri, Madiun dan Bojonegoro
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, dan Pengendalian Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah.
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2025.
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031.
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019.
27. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016.
28. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016.
29. Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.
30. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2016.
31. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2016
32. Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.

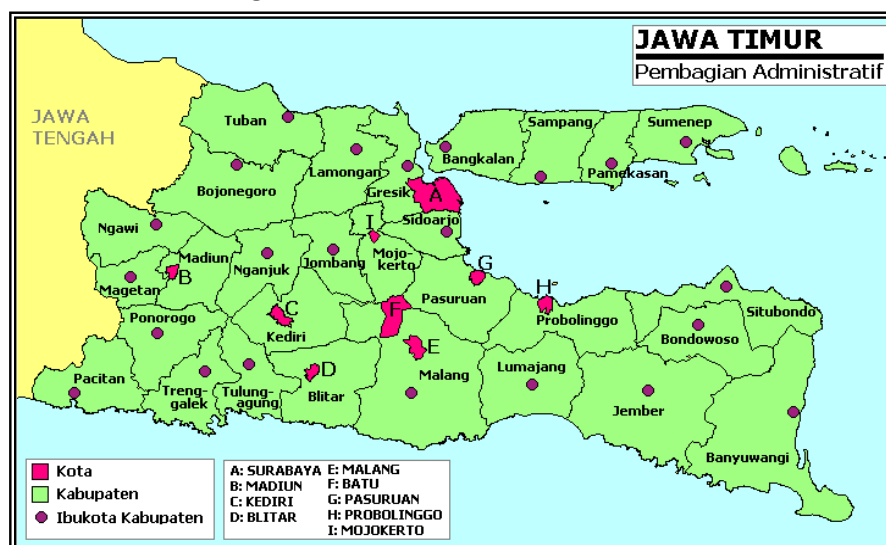
C. GAMBARAN UMUM DAERAH

1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Provinsi Jawa Timur memiliki wilayah terluas di Pulau Jawa, dengan luas mencapai 47.995 Km². Provinsi Jawa Timur terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu Jawa Timur daratan dan Kepulauan Madura. Luas wilayah Jawa Timur daratan sebesar 88,71 persen atau sebesar 42.577 Km², sementara luas Kepulauan Madura sekitar 11,29 persen atau sebesar 5.418 Km². Batas wilayah Provinsi Jawa Timur meliputi : Di sebelah Utara berbatasan dengan Pulau Kalimantan atau tepatnya dengan Provinsi Kalimantan Selatan; Di sebelah Timur Berbatasan dengan Pulau Bali; Di sebelah Selatan Berbatasan dengan perairan terbuka, yaitu Samudra Hindia; dan Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah.

Gambar 1.1
Peta Pembagian Administrasi Kab/Kota Provinsi Jawa Timur



Secara administratif berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, Jawa Timur terdiri atas 38 Kabupaten/Kota (29 Kabupaten dan 9 Kota) yang mempunyai 664 Kecamatan dengan 777 Kelurahan dan 7.724 Desa.

Sementara itu kabupaten di Jawa Timur yang memiliki jumlah kecamatan terbanyak, yaitu Kabupaten Malang dengan 33 kecamatan dan Kabupaten

dengan desa/kelurahan terbanyak adalah Kabupaten Lamongan sebanyak 474 desa/kelurahan.

Tabel 1.1
Jumlah Kecamatan dan Desa Kabupaten/Kota se Jawa Timur

Kabupaten/Kota	Kecamatan	Kelurahan/Desa		
		Kelurahan	Desa	Jumlah
Kabupaten				
01. Pacitan	12	5	166	171
02. Ponorogo	21	26	281	307
03. Trenggalek	14	5	152	157
04. Tulungagung	19	14	257	271
05. Blitar	22	28	220	248
06. Kediri	26	1	343	344
07. Malang	33	12	378	390
08. Lumajang	21	7	198	205
09. Jember	31	22	226	248
10. Banyuwangi	24	28	189	217
11. Bondowoso	23	10	209	219
12. Situbondo	17	4	132	136
13. Probolinggo	24	5	325	330
14. Pasuruan	24	24	341	365
15. Sidoarjo	18	31	322	353
16. Mojokerto	18	5	299	304
17. Jombang	21	4	302	306
18. Nganjuk	20	20	264	284
19. Madiun	15	8	198	206
20. Magetan	18	28	207	235
21. Ngawi	19	4	213	217
22. Bojonegoro	28	11	419	430
23. Tuban	20	17	311	328
24. Lamongan	27	12	462	474
25. Gresik	18	26	330	356
26. Bangkalan	18	8	273	281
27. Sampang	14	6	180	186
28. Pamekasan	13	11	178	189
29. Sumenep	27	4	330	334
Kota				
30. Kediri	3	46	0	46
31. Blitar	3	21	0	21
32. Malang	5	57	0	57
33. Probolinggo	5	29	0	29
34. Pasuruan	4	34	0	34
35. Mojokerto	2	18	0	18
36. Madiun	3	27	0	27

Kabupaten/Kota	Kecamatan	Kelurahan/Desa		
		Kelurahan	Desa	Jumlah
37. Surabaya	31	154	0	154
38. Batu	3	5	19	24
Jumlah	664	777	7.724	8.501

Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur yang memiliki luas wilayah terbesar adalah Kabupaten Banyuwangi yakni seluas 578.240 Ha atau 12,10 persen dari luas total Provinsi Jawa Timur, sedangkan Kabupaten/Kota yang memiliki luas administrasi terkecil adalah Kota Mojokerto yakni 1.647 Ha setara 0,03 persen dari luas Provinsi Jawa Timur.

1.2. Letak dan Kondisi Geografis

a. Posisi Astronomis

Jawa Timur merupakan salah satu provinsi yang terletak di Pulau Jawa (selain DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta). Provinsi Jawa Timur secara astronomis terletak antara 111,00-114,40 Bujur Timur dan 7,12-8,48 Lintang Selatan. Jawa Timur dapat dibagi menjadi dua bagian besar yaitu Jawa Timur daratan dan Kepulauan Madura. Panjang bentangan Barat-Timur Provinsi Jawa Timur sekitar 400 kilometer dan lebar bentangan utara-selatan sekitar 200 kilometer. Jawa Timur memiliki wilayah kepulauan yang terdiri dari pulau bernama sebanyak 232 pulau, pulau tanpa nama sebanyak 55 sehingga total keseluruhan pulau kecil yang dimiliki Provinsi Jawa Timur sebanyak 287 pulau (Sumber: Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, 2004). Pulau Madura adalah pulau terbesar di Jawa Timur, di sebelah timur Pulau Madura terdapat gugusan pulau, paling timur adalah Kepulauan Kangean, dan paling utara adalah Kepulauan Masalembu. Pulau Bawean berada sekitar 150 kilometer sebelah utara pulau Jawa, sedangkan bagian selatan meliputi pulau Nusa Barung, Sempu, Sekel dan Panehan.

b. Kondisi/Kawasan

Kondisi/kawasan pada Provinsi Jawa Timur terbagi menjadi 4 aspek antara lain kondisi kawasan tertinggal, kondisi kawasan pesisir, kondisi kawasan pegunungan dan kondisi kawasan kepulauan. Keempat aspek tersebut dijabarkan sebagai berikut :

➤ **Kondisi/Kawasan Daerah Tertinggal**

Daerah Tertinggal adalah Daerah Kabupaten yang masyarakat serta wilayahnya relatif kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala nasional. Penentuan daerah tertinggal menggunakan 6 (enam) kriteria dasar, yaitu: Perekonomian masyarakat, Sumberdaya manusia, Infrastruktur, Kemampuan keuangan lokal, Aksesibilitas, dan Karakteristik daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah tertinggal mengamanatkan bahwa daerah tertinggal ditetapkan setiap lima tahun secara nasional dengan Peraturan Presiden berdasarkan usulan Menteri dengan melibatkan Kementerian/Lembaga terkait dan Pemerintah Daerah. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah tertinggal Tahun 2015-2019, terdapat Empat Kabupaten di Provinsi Jawa Timur : Kabupaten Sampang, Bangkalan, Situbondo dan Bondowoso merupakan bagian dari 122 Kabupaten diidentifikasi mengalami ketertinggalan dibandingkan dengan wilayah lainnya secara nasional. Daerah Tertinggal rata-rata mempunyai keterbatasan infrastruktur & komunikasi, rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan, serta banyaknya sumberdaya yang belum dikelola secara optimal.

Gambar 1.2
Peta Kawasan Tertinggal di Provinsi Jawa Timur

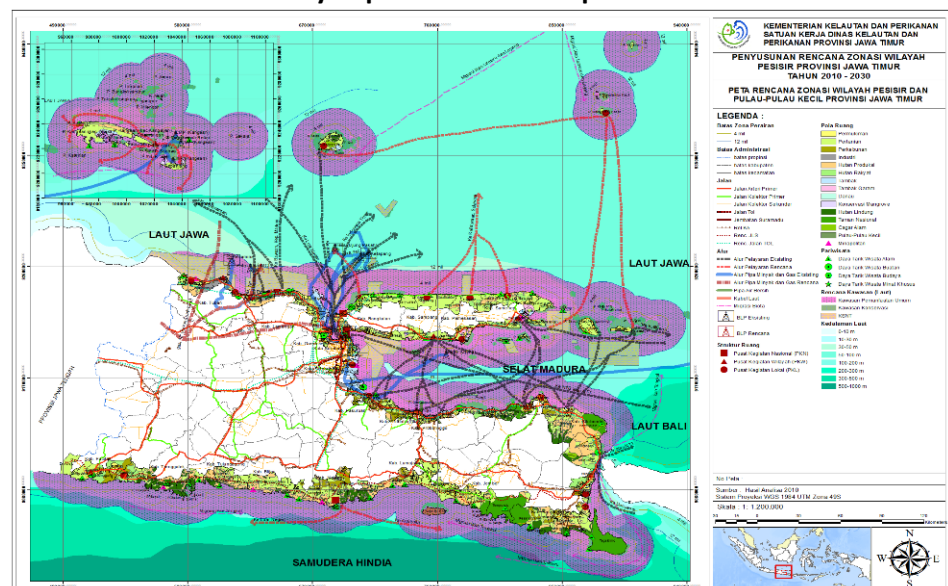


Sumber : Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 -
Tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019

➤ Kondisi/Kawasan Pesisir

Wilayah pesisir adalah daerah pertemuan antara darat dan laut. Ke arah darat wilayah pesisir meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air, yang masih dipengaruhi oleh sifat-sifat laut, seperti pasang surut, angin laut dan perembesan air asin. Sedangkan ke arah laut, wilayah pesisir mencakup bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses alami yang terjadi di darat, seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun yang disebabkan karena kegiatan manusia di darat, seperti penggundulan hutan dan pencemaran.

Gambar 1.3
Peta Rencana Zonasi Wilayah pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Jawa Timur



Sumber : RZWP3K Provinsi Jawa Timur Tahun 2012-2032

Pesisir bagian utara, selatan dan laut di wilayah Provinsi Jawa Timur mempunyai hamparan hutan mangrove, padang lamun dan ekosistem terumbu karang yang mengelilinginya yang harus dilestarikan. Ketiga ekosistem tersebut memiliki ciri, sifat dan karakter yang berbeda – beda akan tetapi saling terkait satu sama lainnya. Hubungan ketiga ekosistem tersebut adalah mutualistik yaitu di antaranya: mangrove menyediakan makanan/hara bagi padang lamun sedangkan padang lamun memecah/meredam gelombang dari lautan sehingga mangrove

tumbuh dengan baik karena mangrove tidak tahan terhadap gelombang cukup besar.

Berdasarkan kondisi geografis, wilayah pesisir dan laut Jawa Timur ke arah daratan sebagian besar merupakan pegunungan dan perbukitan sehingga kemiringan wilayah pesisirnya relatif tinggi. Kemiringan rendah dijumpai pada sebagian kecil wilayah teluk dan lembah. Ke arah laut wilayah pesisir tersusun oleh pasir, tanah padas, batu dan karang dengan kemiringan yang relatif tajam.

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 6 tahun 2012 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Timur Tahun 2012-2032 dimanakan untuk wilayah pesisir bagian laut menjadi Kawasan Pemanfaatan Umum (KPU), Kawasan Konservasi, dan Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT). Sedangkan untuk wilayah pesisir bagian darat arahan pemanfaatan ruang disesuaikan dengan RTRW Kab/Kota yang berlaku.

➤ **Kawasan Pegunungan**

Secara umum wilayah Provinsi Jawa Timur merupakan kawasan subur dengan berbagai jenis tanah seperti Holosen, Pleistosen, Pliosen, Miosen, dan Kwartir yang dipengaruhi adanya gunung berapi dan salah satunya adalah gunung tertinggi di Pulau Jawa yaitu Gunung Semeru. Jajaran pegunungan di Provinsi Jawa Timur tersebar mulai dari perbatasan di timur dengan adanya Gunung Lawu, Gunung Kelud, Gunung Welirang, Gunung Arjuno, Gunung Semeru, Gunung Lamongan, Gunung Bromo, Gunung Argopuro, Gunung Pendil, Gunung Suket, Gunung Ijen, Gunung Merapi, Gunung Raung.

➤ **Kawasan Kepulauan**

Pulau-pulau kecil di Jawa Timur berada dalam wilayah administratif terdiri dari 445 buah pulau yang tersebar di Kabupaten Pacitan (31 pulau), Kabupaten Tulungagung (19 pulau), Kabupaten Blitar (28 pulau), Kabupaten Malang (100 pulau), Kabupaten Situbondo (5

pulau), Kabupaten Sumenep (121 pulau), Kabupaten Gresik (13 pulau), Kabupaten Sampang (1 pulau), Kabupaten Trenggalek (57 pulau), Kabupaten Sidoarjo (4 pulau), Kabupaten Banyuwangi (15 pulau), Kabupaten Jember (50 pulau), dan Kabupaten Probolinggo (1 pulau). Dari beberapa wilayah tersebut kawasan yang memiliki pulau terbanyak adalah Kabupaten Sumenep.

1.3. Topografi

Kondisi topografi Jawa Timur terbagi menjadi 2 (dua) aspek antara lain :

a. Kemiringan Lereng

Sebagian besar wilayah Jawa Timur mempunyai karakteristik topografi daratan relatif datar dengan kemiringan lereng 0-15 % yang berada hampir di seluruh wilayah Provinsi Jawa Timur khususnya di bagian Utara, sedangkan untuk kemiringan lereng 15-40% berada pada daerah perbukitan dan pegunungan, kemiringan lereng >40% berada pada daerah pegunungan yang sebagian besar berada pada kawasan Jawa Timur Bagian Selatan.

Gambar 1.4
Peta Kemiringan Lereng



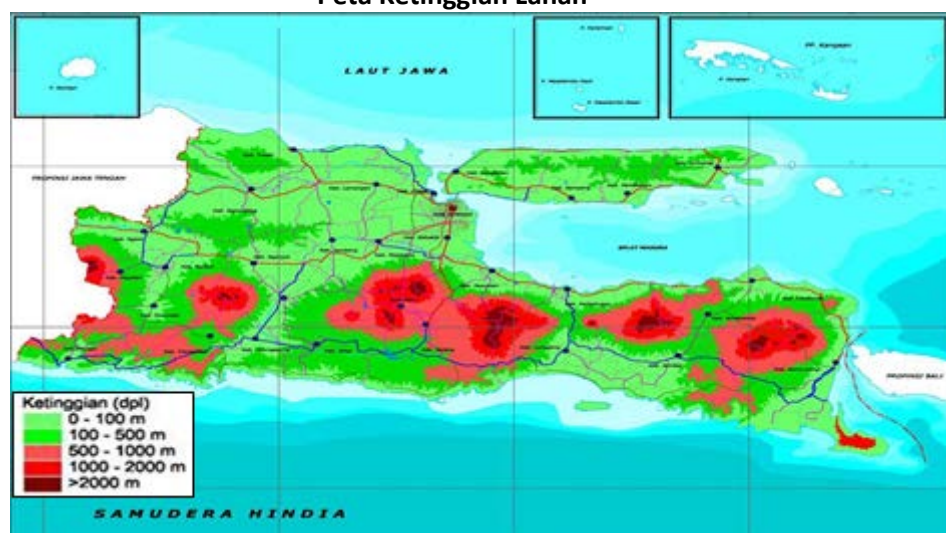
Sumber : RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031

b. Ketinggian Lahan

Secara topografi wilayah daratan Jawa Timur dibedakan menjadi beberapa wilayah ketinggian, yaitu :

- Ketinggian 0 – 100 meter dari permukaan laut: meliputi 41,39 % dari seluruh luas wilayah dengan topografi relatif datar dan bergelombang.
- Ketinggian 100 – 500 meter dari permukaan laut: meliputi 36,58 % dari luas wilayah dengan topografi bergelombang dan bergunung.
- Ketinggian 500 – 1000 meter dari permukaan laut: meliputi 9,49 % dari luas wilayah dengan kondisi berbukit.
- Ketinggian lebih dari 1.000 meter dari permukaan laut : meliputi 12,55 % dari seluruh luas wilayah dengan topografi bergunung dan terjal.

Gambar 1.5
Peta Ketinggian Lahan



Sumber : RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031

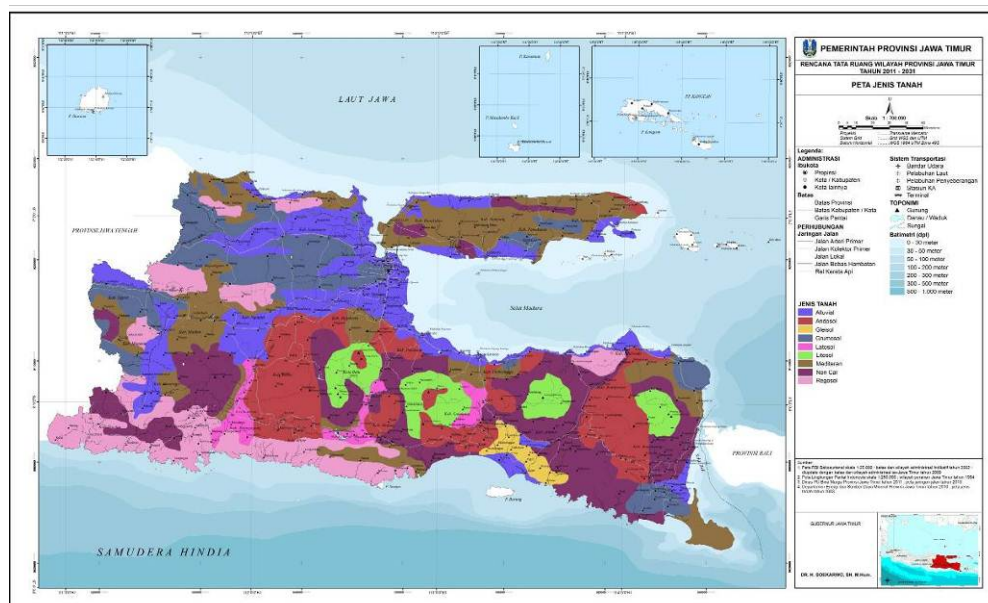
1.4. Geologi

a. Struktur dan Karakteristik

Secara umum wilayah Jawa Timur merupakan kawasan subur dengan berbagai jenis tanah seperti Holosen, Pleistosen, Pliosen, Miosen, dan Kwartar yang dipengaruhi adanya gunung berapi. Sekitar 20,60 % luas wilayah yaitu wilayah puncak gunung api dan perbukitan gamping yang mempunyai sifat erosif, sehingga tidak baik untuk dibudidayakan sebagai lahan pertanian. Sebagian besar wilayah Jawa Timur mempunyai kemiringan tanah 0-15 %, sekitar 65,49 % dari luas wilayah yaitu dataran aluvial antar

gunung api sampai delta sungai dan pesisir yang mempunyai tingkat kesuburan tinggi dan dataran aluvial di lajur Kendeng yang subur, dataran aluvial di daerah gamping lajur Rembang dan lajur Pegunungan Selatan cukup subur.

Gambar 1.6
Peta Jenis Tanah Provinsi Jawa Timur



Sumber : RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031

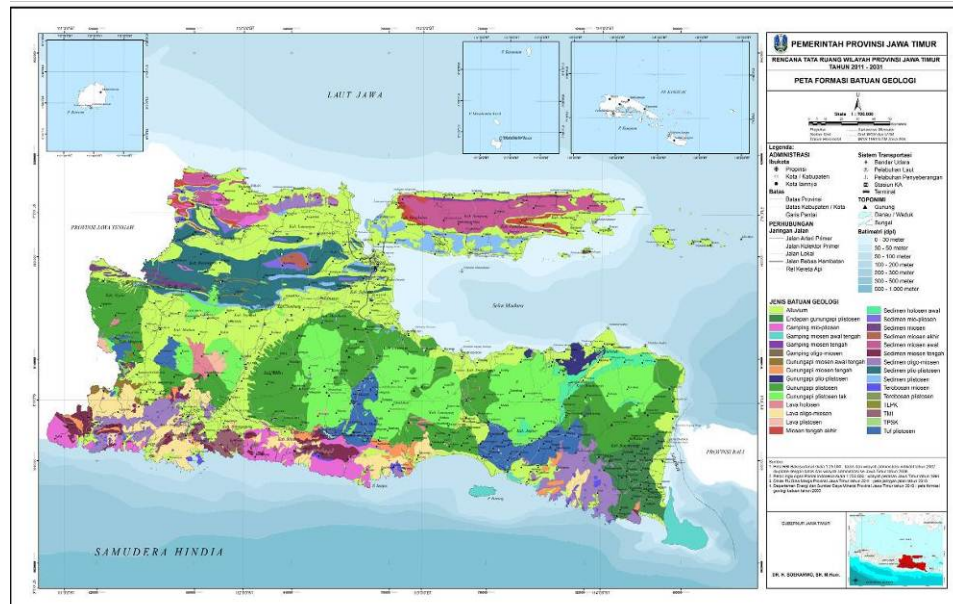
b. Potensi Kandungan

Kondisi geologi Jawa Timur yang cukup kaya potensi sumberdaya mineral, memiliki sekitar 20 jenis bahan galian yang mendukung sektor industri maupun konstruksi, yang secara umum dapat dikelompokkan menjadi empat lajur, yaitu:

- Lajur Rembang terbentuk oleh batu lempung napalan dan batu gamping merupakan cekungan tempat terakumulasinya minyak dan gas bumi;
- Lajur Kendeng terbentuk batu lempung dan batupasir, potensi lempung, bentonit, gamping;
- Lajur Gunung Api Tengah terbentuk oleh endapan material gunung api kuarter, potensi bahan galian konstruksi berupa batu pecah, krakal, krikil, pasir, tuf; dan
- Lajur Pegunungan Selatan terbentuk oleh batu gamping dengan intrusi

batuan beku dan aliran lava yang mengalami tekanan, potensi mineral logam, marmer, onyx, batu gamping, bentonit, pospat.

Gambar 1.7
Peta Formasi Batuan Geologi Provinsi Jawa Timur

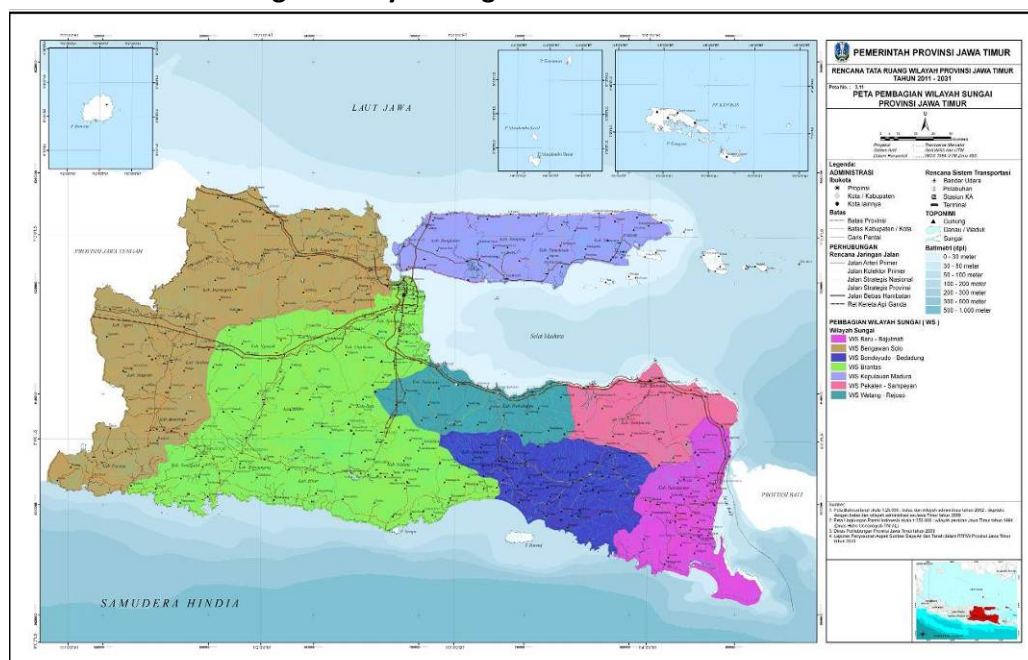


Sumber : RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031

1.5. Hidrologi

Provinsi Jawa Timur dialiri oleh dua daerah aliran sungai terpenting yaitu Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas dan DAS Bengawan Solo. DAS Brantas merupakan sebuah sungai terbesar di Jawa Timur dengan panjang ± 320 km yang mengalir secara melingkar dan di tengah-tengahnya terdapat gunung berapi yang masih aktif yaitu Gunung Kelud. Sungai Brantas yang bersumber pada lereng Gunung Arjuno, mula-mula mengalir ke arah timur melalui kota Malang, lalu membelok ke arah selatan. Di kota Kepanjen Kali Brantas membelok ke arah barat dan di sini Kali Lesti yang bersumber dari Gunung Semeru bersatu dengan Kali Brantas. Setelah itu bersatu dengan Kali Ngrowo di Tulungagung, Kali Brantas berbelok ke utara melalui kota Kediri. Di kota Kertosono, Kali Brantas bertemu dengan Kali Widas, kemudian ke Timur mengalir ke kota Mojokerto. Di kota ini Kali Brantas bercabang dua, ke arah Surabaya dan ke Porong yang selanjutnya bermuara di selat Madura.

Gambar 1.8
Peta Pembagian Wilayah Sungai Provinsi Jawa Timur



Sumber : RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031

Secara hidrologi wilayah Provinsi Jawa Timur terdiri dari air permukaan dan air tanah. Air permukaan meliputi Wilayah Sungai (WS), dan Waduk, sedangkan air tanah berupa mata air. Pembagian WS di meliputi tujuh WS yaitu WS Bengawan Solo, WS Brantas, WS Welang – Rejoso, WS Pekalen – Sampean, WS Baru – Bajulmati, WS Bondoyudo – Bedadung, dan WS Madura.

Tabel 1.2
Luas Catchment Area (km²) Pada Wilayah Sungai di Provinsi Jawa Timur

No	Wilayah Sungai	Luas (Km ²)	Jumlah DAS
1	Bengawan Solo	13.070,00	94 DAS
2	Brantas	13.880,00	20 DAS
3	Welang – Rejoso	2.601,00	36 DAS
4	Pekalen – Sampean	3.953,00	56 DAS
5	Baru – Bajulmati	3.675,00	60 DAS
6	Bondoyudo – Bedadung	5.364,00	47 DAS
7	Madura	4.575,00	173 DAS

Sumber : Pengairan dalam angka

Luas Catchment area tertinggi di provinsi Jawa Timur berada pada Wilayah Sungai Brantas dengan luas 13.880 km² dan terendah di Wilayah Sungai Welang – Rejoso dengan luas 2.601 km². Catchment area ini berfungsi

menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan baik ke danau, sungai maupun ke laut, sehingga menciptakan suatu ekosistem, catchment area ini erat kaitannya dengan Daerah Aliran Sungai (DAS).

1.6. Klimatologi

Keadaan iklim di Provinsi Jawa Timur secara umum termasuk iklim tropis yang mengenal 2 (dua) perubahan putaran musim, yaitu musim Kemarau (Mei-Oktober) dan musim Penghujan (Nopember-sampai sekitar bulan April). Curah hujan rata-rata antara 1.500 mm/tahun - 2.700 mm/tahun Hingga bulan Desember seluruh wilayah di Jawa Timur sudah memasuki musim penghujan. Hampir setiap hari hujan mengguyur semua wilayah dengan intensitas ringan hingga lebat. Suhu rata-rata kisaran minimum 15,2 derajat celcius dan maksimal 34,2 derajat celcius. Berdasarkan sistem klasifikasi Schmidt dan Ferguson sebagian besar wilayah (52%) mempunyai iklim tipe D. Kelembaban udara berkisar 40% hingga 97%. Suhu udara rata-rata berkisar 27–31 C0. Tetapi ada wilayah yang mempunyai suhu agak panas berkisar 31–35 C0 dan mempunyai suhu sejuk antara 20–25 C0 Daerah panas umumnya di daratan rendah dan pesisir, sedangkan daerah yang bersuhu sejuk umumnya di daerah tinggi. Kelembaban udara rata-rata selama tahun 2015 antara 66–83 persen maksimal kelembaban udara bias mencapai 99 persen, sedangkan terendah bias mencapai 37 persen.

Tabel 1.3
Keadaan Cuaca Bulanan Tahun 2015

Bulan	Suhu Udara			Kelembaban Udara			Curah Hujan	Tekanan Udara		Kecepatan Angin	Penyinaran Matahari
	Maks	Min	Rata-rata	Maks	Min	Rata-rata		Maks	Min		
01. Januari	33,40	22,20	27,50	99	43	81	464,70	1 014,20	1 007,80	8,30	54
02. Februari	33,40	22,40	27,30	97	55	83	437,40	1 012,70	1 008,80	7,00	66
03. Maret	33,40	22,40	27,80	97	55	82	479,80	1 013,50	1 009,60	7,00	61
04. April	33,60	23,70	27,90	97	55	83	259,20	1 012,40	1 008,10	6,60	61
05. Mei	32,40	22,70	28,20	97	51	77	181,60	1 014,00	1 010,00	6,80	87
06. Juni	32,80	21,80	27,70	92	47	73	-	1 016,10	1 009,40	6,70	93
07. Juli	31,80	21,00	26,90	92	45	74	1,60	1 015,40	1 010,60	8,00	94
08. Agustus	32,50	20,80	26,90	88	37	72	17,90	1 014,70	1 010,50	8,20	96
09. September	33,60	20,50	26,60	85	40	68	-	1 015,50	1 011,60	8,30	99
10. Oktober	34,80	22,80	28,70	86	38	66	-	1 015,50	1 011,80	9,00	99
11. November	35,60	24,60	30,50	90	38	68	52,60	1 012,00	1 009,30	7,00	89
12. Desember	35,40	23,60	28,90	92	47	77	129,90	1 013,20	1 008,40	7,50	62

Sumber : Stasiun Meteorologi Klas I Juanda

Rata-rata kecepatan angin di Jawa Timur berkisar 6,6–9 knot dan bulan Juli–Maret kecepatan anginnya diatas 7 knot. Sedang di bulan April–Juni di bawah 7 knot. Kecepatan angin tertinggi terjadi bulan Oktober. Rata-rata lama penyinaran matahari terendah di bulan Desember–Maret di bawah 70 persen. Sedangkan bulan lainnya di atas 85 persen. Penyinaran matahari terbanyak bulan September dan Oktober atau sebesar 99 persen. Sedangkan terendah di bulan Januari hanya sebesar 54 persen. Rata-rata curah hujan tertinggi selama tahun 2015 terjadi di bulan Januari–Mei. Tertinggi di Maret atau sebesar 479,8 mm, Terendah di bulan Juni–September. Rata-rata jumlah hari hujan di bulan Januari–April lebih dari 20 hari. Terbanyak di bulan Pebruari 25 hari. Curah hujan pada bulan Mei sebesar 181,6 mm, tetapi jumlah hari hujan hanya 12 hari. Kondisi ini juga terjadi di bulan Desember, curah hujan 129,9 mm, tetapi hari hujan hanya 17 hari. Kemarau terasa di bulan Juni hingga Nopemver 2015. Selama periode itu curah hujan sangat mudah di bawah 20 mm, dan jumlah hari hujan sangat sedikit di bawah 5 hari per bulannya.

1.7. Penggunaan Lahan

Secara umum penggunaan lahan di Provinsi Jawa Timur dapat dibagi menjadi 2 bagian besar, yaitu :

a. Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. penggunaan lahan budidaya adalah seluas kurang lebih 4.201.403,70 Ha atau 87,90% dari luas wilayah provinsi Jawa Timur. Gambaran perubahan proporsi penggunaan lahan di Jawa Timur menunjukkan kecenderungan menurunnya luas wilayah pertanian. Pertanian lahan basah memiliki luas kurang lebih 911.863 Ha atau 19,08% dari luas wilayah provinsi Jawa Timur. Penggunaan lahan kawasan terbangun dikendalikan agar tidak mengkonversi luas pertanian lahan basah, terutama sawah irigasi teknis.

b. Kawasan Lindung

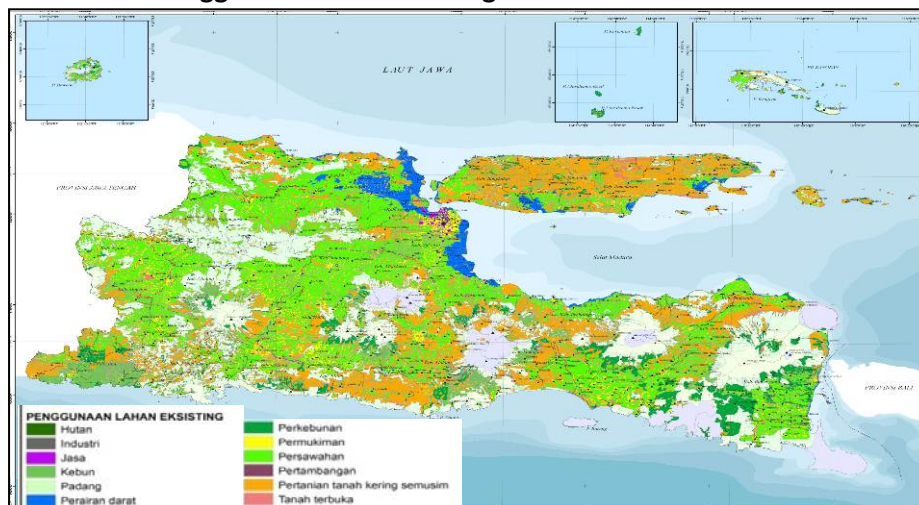
Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Kawasan lindung memiliki luas kurang lebih 578.571,30 Ha atau sekitar 12,11 Persen dari luas wilayah Provinsi Jawa Timur, termasuk di dalamnya kawasan lindung mutlak di mana terdapat cagar alam seluas kurang lebih 10.958 Ha, suaka margasatwa seluas kurang lebih 18.009 Ha, taman nasional seluas kurang lebih 176.696 Ha, taman hutan raya seluas kurang lebih 27.868,3 Ha serta taman wisata alam seluas 298 Ha (SK Menteri Kehutanan Nomor 395/Menhut-II/2011)

Tabel 1.4
Penggunaan Lahan Eksisting Provinsi Jawa Timur

No.	Penggunaan Lahan	Eksisting (Ha)	Prosentase (%)
A	Kawasan Lindung	578.571,30	12,11
1	Hutan Lindung	344.742,00	7,21
2	Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam	233.829,30	4,90
	a. Suaka Margasatwa	18.009,00	0,38
	b. Cagar Alam	10.958,00	0,23
	c. Taman Nasional	176.696,00	3,70
	d. Taman Hutan Raya	27.868,30	0,58
	e. Taman Wisata Alam	298,00	0,01
B	Kawasan Budidaya	4.201.403,70	87,89
1	Kawasan Hutan Produksi	782.772,00	16,38
2	Kawasan Hutan Rakyat	361.570,30	7,56
3	Kawasan Pertanian	2.020.490,71	42,27
	a. Pertanian Lahan Basah	911.863,00	19,08
	b. Pertanian Lahan Kering/ Tegalan/Kebun Campur	1.108.627,71	23,19
4	Kawasan Perkebunan	359.481,00	7,52
5	Kawasan Industri	7.403,80	0,15
6	Kawasan Pemukiman	595.255,00	12,45
7	Lainnya	74.430,89	1,56
Total		4.779.975,00	100,00

Sumber : RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031

Gambar 1.9
Penggunaan Lahan Eksisting Provinsi Jawa Timur



Sumber : RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031

2. Potensi Pengembangan Wilayah

2.1 Potensi Pertanian

Potensi Pertanian Berdasarkan Perda Jawa Timur No 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Luas eksisting kawasan pertanian sebesar 2.020.491,71 ha dengan rincian pertanian lahan basah sebesar 911.863 ha dan pertanian lahan kering/tegalan/kebun campur sebesar 1.108.627,71 ha.

Rencana penggunaan lahan untuk pertanian lahan basah berupa sawah beririgasi teknis dengan luas sekurang-kurangnya 957.239 Ha atau 20,03% dari luas Jawa Timur dengan peningkatan jaringan irigasi semi teknis dan sederhana menjadi irigasi teknis tersebar di masing-masing wilayah sungai.

Gambar 1.10
Peta Peruntukan Pertanian Pangan Lahan Basah dan Kering Prov. Jatim



Sumber : RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031

Rencana pengembangan pertanian lahan kering di wilayah Provinsi Jawa Timur ditetapkan dengan luas sekurang-kurangnya 849.033 Ha atau 17,76% dari luas Jawa Timur yang diarahkan pada daerah-daerah yang belum terlayani oleh jaringan irigasi. Untuk mencukupi kebutuhan pangan nasional dan kebutuhan pangan Provinsi Jawa Timur, perlu dilakukan perlindungan terhadap lahan pertanian pangan sehingga dapat menjamin ketersediaan pangan. Berdasarkan hal tersebut Provinsi Jawa Timur menetapkan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) seluas kurang lebih 1.017.549,72 Ha dengan rincian lahan basah seluas 802.357,9 Ha dan lahan kering seluas 215.191.83 Ha.

2.2 Potensi Perkebunan

Kawasan perkebunan di Jawa Timur dikembangkan berdasarkan fungsi kawasan dan potensi yang ada pada daerah masing-masing berdasarkan prospek ekonomi yang dimiliki. Pengembangan kawasan perkebunan diarahkan untuk meningkatkan peran serta, efisiensi, produktivitas dan keberlanjutan. Berdasarkan komoditasnya, pengembangan perkebunan dapat dibagi dalam 2 (dua) kelompok yakni perkebunan tanaman tahunan seperti: tebu, tembakau, kapas, serat karung dan wijen dan perkebunan tanaman semusim antara lain berupa: kelapa, kopi, kakao, cengkeh, jambu mete, cabe jamu, kapok randu, teh, kenanga, panili, lada, kemiri, jarak kepyar, jarak pagar, siwalan, serat nanas, pinang, kayu manis, asam jawa, aren, mendong, janggolan, nilam, pandan, nipah, pala, melinjo, karet, dsb.

Gambar 1.11
Peta Peruntukan Perkebunan Provinsi Jawa Timur



Sumber : RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031

2.3 Potensi Perikanan

Potensi Perikanan Provinsi Jawa Timur pada dasarnya adalah pengembangan perikanan tangkap, perikanan budidaya, dan pengelolaan serta pemasaran hasil perikanan yang dikemas dalam sebuah sistem minapolitan. Pengembangan kawasan perikanan tangkap di Jawa Timur memiliki prospek yang bagus, didukung oleh pengembangan pelabuhan perikanan Brondong yang terletak di Pantai Utara Jawa Timur, pengembangan pelabuhan perikanan Muncar di Kabupaten Banyuwangi, dan Prigi di Kabupaten Trenggalek.

Gambar 1.12
Peta Peruntukan Perikanan Budidaya Air Payau Provinsi Jawa Timur



Sumber : RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031

Pengembangan kawasan peruntukan perikanan budidaya terdiri dari perikanan budidaya air payau, perikanan budidaya air tawar, dan perikanan budidaya air laut. Sektor perikanan budidaya air payau berada pada kawasan Ujung Pangkah dan Panceng di Kabupaten Gresik, serta Sedati di Kabupaten Sidoarjo dengan komoditas ikan bandeng dan garam. Sedangkan potensi garam yang merupakan salah satu potensi budidaya air payau berada pada Kabupaten Bangkalan, Gresik, Lamongan, Pamekasan, Pasuruan, Probolinggo, Sampang, Sumenep, Tuban, serta Kota Pasuruan, dan Surabaya. Perikanan budidaya air tawar berada pada Kabupaten Bojonegoro, Lamongan, Magetan, Malang, Blitar, Trenggalek, Tulungagung, Jember, dan Banyuwangi. Perikanan budidaya air laut

tersebar pada wilayah pesisir seperti adanya sentra pengembangan ikan laut di bagian pantai utara Jawa Timur.

2.4 Potensi Kehutanan

Kawasan hutan budidaya dibedakan menjadi hutan produksi dan hutan rakyat. Hutan produksi dimaksudkan untuk menyediakan komoditas hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan untuk keperluan industri, sekaligus untuk melindungi kawasan hutan yang ditetapkan sebagai hutan lindung dan hutan konservasi dari kerusakan akibat pengambilan hasil hutan yang tidak terkendali. Hutan produksi merupakan kawasan hutan yang secara ruang digunakan untuk budi daya hutan alam dan hutan tanaman. Sedangkan Hutan rakyat dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan iklim makro, memenuhi kebutuhan akan hasil hutan dan berada pada lahan-lahan masyarakat dan dikelola oleh masyarakat.

Gambar 1.13
Peta Peruntukan Hutan Produksi Provinsi Jawa Timur



Sumber : RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031

2.5 Potensi Peternakan

Kawasan peternakan secara khusus diperuntukan bagi kegiatan peternakan melalui pengembangan sentra ternak dalam skala besar maupun kecil dan sentra peternakan unggas dan lainnya. Pengembangan ternak ini akan lebih memiliki nilai tambah melalui pengembangan agrobisnis peternakan.

Pengembangan kawasan agrobisnis berbasis peternakan dilakukan untuk menjawab tuntutan kecukupan (swasembada) daging dan telur serta susu dalam negeri, sekaligus meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan peternak. Kawasan peruntukan peternakan meliputi:

- Sentra peternakan ternak besar meliputi sapi, kerbau dan kuda;
- Sentra peternakan ternak kecil meliputi kambing, domba dan babi
- Sentra peternakan unggas meliputi Ayam, Itik, Entok ; dan
- Sentra ternak lainnya meliputi kelinci.

2.6 Potensi Pertambangan

Kawasan peruntukan pertambangan di wilayah Provinsi Jawa Timur dibagi menjadi kawasan pertambangan mineral, pertambangan minyak dan gas bumi dan kawasan potensi daerah panas bumi.

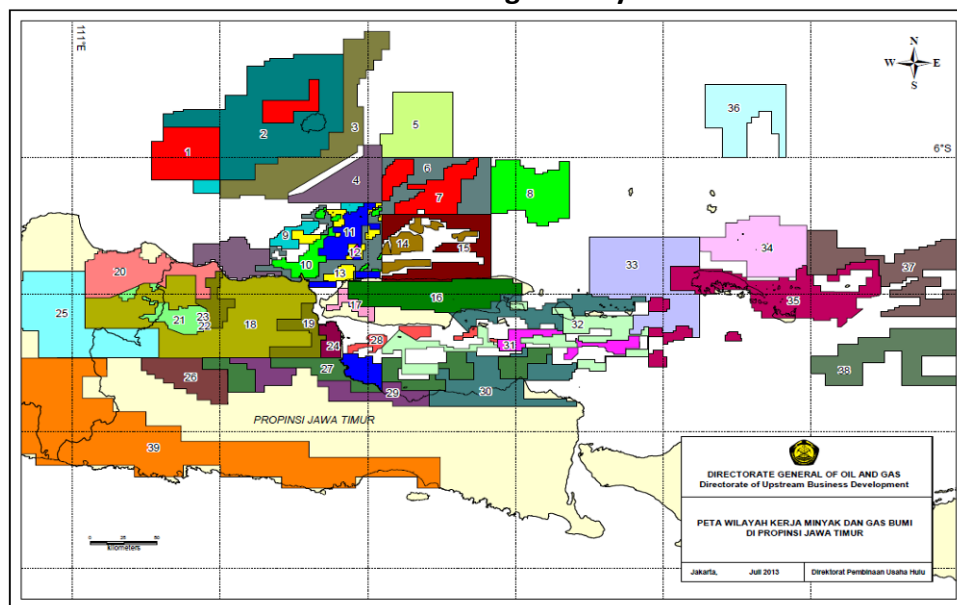
a. Pertambangan Mineral : Pertambangan mineral di Jawa Timur dibagi menjadi kawasan pertambangan mineral logam, mineral non logam dan batuan.

- Kawasan pertambangan mineral logam di wilayah Provinsi Jawa Timur berada di wilayah Kabupaten Banyuwangi, Blitar, Jember, Lumajang, Malang, Pacitan, Trenggalek, Tulungagung. Adapun potensi pertambangan mineral logam yang ada di Jawa Timur, diantaranya adalah Pasir Besi, Emas dan Mineral Pengikutnya, dan Mangan. Beberapa di antaranya sudah teridentifikasi, di Kabupaten Pacitan diketahui terdapat potensi Pasir Besi kurang lebih 24.948.189 ton yang berada di Kecamatan Ngadirejo.
- Kawasan pertambangan mineral bukan logam tersebar di seluruh wilayah kabupaten di Jawa Timur. Potensi pertambangan mineral bukan logam yang sejauh ini dianggap potensial meliputi: Bentonite, Phiropilit, Feldspar, Zeolit, Feldspar, Kaolin, Phiropilit, Toseki, Pasir/Sirtu, dan Pasir Kwarsa yang tersebar di berbagai kabupaten di Jawa Timur
- Kawasan pertambangan batuan tersebar di seluruh wilayah kabupaten di Jawa Timur, terutama pada wilayah sekitar gunung api. yaitu diantaranya batuan gamping, andesit, trass, marmer, tanah liat, tanah urug, opal, kalsedon, diorit, pasir, sirtu, onyx, toseki, breksi, jasper dan tuff. Sedangkan

untuk potensi Potensi batubara di Jawa Timur tersebar di tiga kabupaten yaitu Trenggalek, Pacitan dan Tulungagung.

- b. Pertambangan Minyak dan Gas Bumi :** Kawasan pertambangan minyak dan gas bumi di wilayah Provinsi Jawa Timur berada di wilayah Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Gresik, Kabupaten Jombang, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Tuban, dan Kota Surabaya. Di wilayah Jawa Timur terdapat 39 blok migas, yang berstatus Produksi sebanyak 13 (tiga belas) Wilayah Kerja, status eksplorasi sebanyak 23 (dua puluh tiga) Wilayah Kerja dan status development sebanyak 3 (tiga) Wilayah Kerja.

Gambar 1.14
Peta Peruntukan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi



Sumber : RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031

- c. Potensi Panas Bumi atau Geothermal** adalah sumber energi yang relatif ramah lingkungan karena berasal dari panas dalam bumi. Pemanfaatan energi panas bumi diyakini menjadi salah satu sumber energi alternatif. Potensi panas bumi di Wilayah Provinsi Jawa Timur berada pada lokasi yang berdekatan dengan gunung api aktif.

Tabel 1.5
Potensi Panas Bumi di Provinsi Jawa Timur

No.	Lapangan	Potensi (MWE)	Kabupaten / Kota	Keterangan
1	Gunung Lawu	195	Kab. Karanganyar, Sragen, Wonogiri (Prov. Jawa Tengah), Kab. Ngawi, Magetan (Prov. Jawa Timur) kewenangan Pusat	Telah ditetapkan sebagai Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) 2518 K/30/MEM/2014 13 Agustus 2012 Lelang oleh Pemerintah Pusat
2	Arjosari	18,5	Kab. Pacitan	Survei Rekonais Ttahun 2013, Dinas ESDM Jawa Timur
3	Melati	13,5	Kab. Pacitan	Survei Rekonais Ttahun 2013, Dinas ESDM Jawa Timur
4	Ngebel - Wilis	165	Kab. Ponorogo dan Kab. Madiun	Eksplorasi Ijin Usah Pertambangan (IUP) 188/63/KPTS/119.3/2011 16 Juni 2011 PT. Medco Cahaya Geothermal
5	Gunung Wilis	50	Kab. Ponorogo, Kab. Madiun, Kab. Nganjuk, Kab. Kediri, Kab. Tulungagung dan Kab. Trenggalek	Telah ditetapkan sebagai Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) 2775 K/30/MEM/2014 3 Juni 2014
6	Gunung Pandan	60	Kab. Madiun dan Kab. Bojonegoro	Telah ditetapkan sebagai Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) 2774 K/30/MEM/2014 3 Juni 2014
	Songgoriti	35	Kota Batu dan Kab. Malang	Telah ditetapkan sebagai Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) 2776 K/30/MEM/2014 2 Juni 2014
8	Arjuno - Welirang	185	Kab. Mojokerto, Kab. Pasuruan dan Kab. Malang	Telah ditetapkan sebagai Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) 2773K/30/MEM/ 2014 (3 Juni 2014)
9	Bromo - Tengger	-	Kab. Pasuruan, Kab. Probolinggo, Kab. Lumajang, Kab. Malang dan Kota Malang	Penugasan Survey Pendahuluan (PSP) 2903 K/30/MEM/2013 30 Juli 2013 PT. Hitay Renewable Energy
10	Krucil-Tiris	147	Kab. Probolinggo dan Kab. Lumajang	Penugasan Survey Pendahuluan (PSP) PT. Hitay Rawas Energy
11	Iyang - Argopuro	295	Kab. Probolinggo dan Kab. Lumajang	Eksplorasi Ijin Usaha Pertambangan (IUP) 1521K/034/M.PE/1990

No.	Lapangan	Potensi (MWE)	Kabupaten / Kota	Keterangan
				30 Oktober 1990 PT. Pertamina Geothermal Energy
12	Gunung Raung	-	Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi	Pelaksanaan Survey Pendahuluan Panasbumi (PSP) PT. Hitay Runcing Energy
13	Blawan - Ijen	110	Kab. Bondowoso, Kab. Banyuwangi dan Kab. Situbondo	Eksplorasi Ijin Usaha Pertambangan (IUP) 188/62/KPTS/119.3/2011 25 Mei 2011 PT. Bakrie Dharmakarya Energy
14	Pulau Bawean	14,5	Kabupaten Gresik	Survei Rekonais Tahun 2013, Dinas ESDM Jawa Timur
15	Gunung Kelud	Potensi yang belum teridentifikasi	Kabupaten Blitar dan Kediri	Terdapat Sumber air panas yang diduga berasal dari kawah Gunung Kelud
16	Parengan – Kec. Rengel	Potensi yang belum teridentifikasi	Kabupaten Tuban	Terdapat sumber air panas: 1. Dsn. Nganget Ds. Kedungjambe Kec. Singgahan T = 46,6 °C pH = 6,9 2. Dsn. Prataan Ds. Wukiharjo Kec. Parengan T = 43,8 °C pH = 6,99

Sumber : Dinas ESDM Prov Jawa Timur

2.7 Potensi Pariwisata

Potensi Pariwisata Berdasarkan Perda Jawa Timur No 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, kawasan peruntukan pariwisata di Provinsi Jawa Timur meliputi daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan daya Tarik wisata hasil buatan manusia.

Daya Tarik Wisata Alam di Jawa Timur meliputi:

- Air Terjun Dlundung di Kabupaten Mojokerto;
- Air Terjun Sedudo dan Pemandian Sumber Karya di Kabupaten Nganjuk;
- Air Terjun Madakaripura, Bromo-Ngadisari, dan Pantai Bentar di Kabupaten Probolinggo;
- Air Terjun Watu Ondo di perbatasan Kabupaten Mojokerto, Kota Batu;
- Api Abadi di Kabupaten Pamekasan;
- Arak-Arak di Kabupaten Bondowoso;
- Banyuanget, Gua Gong, Gua Tabuhan, Pantai Teleng Ria di Kabupaten Pacitan;
- Bukit Bededung dan Pantai Pasir Putih di Kabupaten Situbondo;
- Coban Glotak, Pantai Balekambang, Pantai Ngliyep di Kabupaten Malang;
- Danau Kastoba dan Pantai Labuhan di Pulau Bawean Kabupaten Gresik;

- Grajagan, Pantai Plengkung, Pantai Sukamade, Kawah Ijen di Kab. Banyuwangi;
- Gua Lowo, Pantai Karanggongso, Pantai Prigi, dan Tirta Jualita di Kab.Trenggalek;
- Gua Maharani dan Pantai Tanjung Kodok di Kabupaten Lamongan;
- Gunung Kelud di Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri;
- Gunung Wilis di Kabupaten Kediri, Kabupaten Madiun, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Trenggalek, dan Kabupaten Tulungagung;
- Hutan Bambu, Pantai Watu Godeg, Ranu Bedali, Ranu Klakah, dan Ranu Pane di Kabupaten Lumajang;
- Hutan Surya, Pemandian Talun, dan Waduk Pondok di Kab Ngawi;
- Kakek Bodo di Kabupaten Pasuruan;
- Kayangan di Kabupaten Bojonegoro;
- Kawah Ijen di Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Bondowoso;
- Pantai Lombang dan Pantai Slopeng di Kabupaten Sumenep;
- Pantai Popoh di Kabupaten Tulungagung;
- Pantai Rongkang di Kabupaten Bangkalan;
- Pantai Watu Ulo di Kabupaten Jember;
- Pemandian Air Panas Cagar Tahura R. Soerjo di Kota Batu;
- Tahura R. Soeryo di Kabupaten Jombang, Kabupaten Malang,
- Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Pasuruan, dan Kota Batu;
- Taman Nasional Bromo–Tengger–Semeru (BTS) di Kabupaten Lumajang, Malang, Pasuruan, dan Probolinggo;
- Telaga Ngebel dan Tirta Manggolo di Kabupaten Ponorogo; dan Telaga Sarangan di Kabupaten Magetan.

Daya Tarik Wisata Budaya, daya tarik wisata budaya di Jawa Timur meliputi:

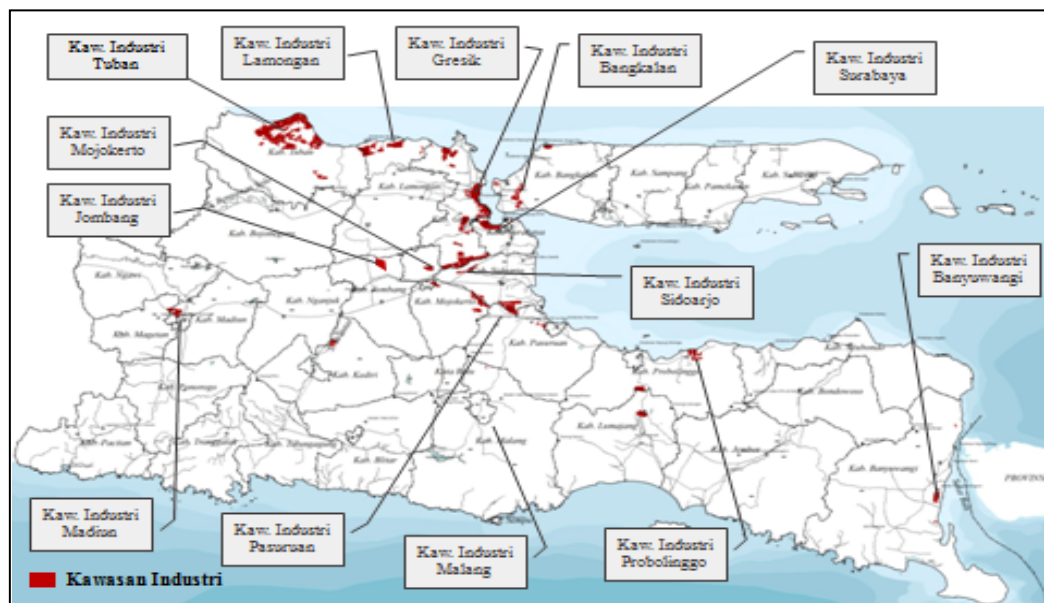
- Asta Yusuf, Asta Tinggi, Keraton, Masjid Agung, dan Museum di Kabupaten Sumenep;
- Candi Jabung di Kabupaten Malang;
- Candi Jabung Tirta di Kabupaten Probolinggo;
- Candi Penampihan di Kabupaten Tulungagung;
- Candi Penataran di Kabupaten Blitar;
- Gereja Poh Sarang dan Petilasan Jayabaya di Kabupaten Kediri;
- Gua Akbar, Makam Bektı Harjo, Makam Ibrahim Asmorokondi, dan Makam Sunan Bonang di Kabupaten Tuban;
- Kompleks Makam K.H. Hasyim Asy'ari, K.H. Wachid Hasyim, Gus Dur, dan Sayid Sulaiman di Kabupaten Jombang;
- Makam Aer Mata Ebu di Kabupaten Bangkalan;
- Makam Batoro Katong di Kabupaten Ponorogo;

- Makam Proklamator Bung Karno di Kota Blitar;
- Makam Ratu Ebu di Kabupaten Sampang;
- Makam Sunan Ampel dan Mbah Bungkul di Kota Surabaya;
- Makam Sunan Drajat di Kabupaten Lamongan;
- Makam Sunan Giri, Makam Maulana Malik Ibrahim, dan Fatimah Binti Maemun di Kabupaten Gresik;
- Makam Troloyo di Kabupaten Mojokerto;
- Pura Mandara Giri Semeru Agung di Kabupaten Lumajang; dan Situs Peninggalan Budaya Majapahit di Kabupaten Mojokerto.
- Daya Tarik Wisata Hasil Buatan Manusia
- Daya tarik wisata hasil buatan manusia di wilayah Jawa Timur meliputi:
- Bendungan Widas dan Taman Umbul Kab Madiun;
- Kawasan Kaki Jembatan Suramadu (KKJS) di Kabupaten Bangkalan dan Kota Surabaya;
- Kebun Binatang Surabaya di Kota Surabaya;
- Kebun Raya Purwodadi & Pemandian Banyubiru di Kab Pasuruan;
- Kolam Renang Ubalan di Kabupaten Mojokerto;
- Pemandian Blambangan, Pemandian Kebon Agung, dan Pemandian Petemon di Kabupaten Jember;
- Pemandian Talun & Waduk Pondok Kabupaten Ngawi;
- Sumber Boto dan Tirta Wisata di Kabupaten Jombang;
- Taman Kosala Tirta, Taman Manunggal, & Tirtosari di Kab Magetan;
- Taman Safari di Kabupaten Pasuruan;
- Taman Sengkaling dan Waduk Selorejo Kab Malang;
- Taman Suruh di Kabupaten Banyuwangi;
- Ubalan Kalasan di Kabupaten Kediri;
- Waduk Gondang dan Wisata Bahari Lamongan Kabupaten Lamongan; dan
- Waduk Wonorejo di Kabupaten Tulungagung.

2.8 Potensi Industri

Kawasan peruntukan industri di Provinsi Jawa Timur meliputi: Kawasan industri, Kawasan peruntukan industri di luar kawasan industri, dan sentra industri. Untuk mendorong pertumbuhan wilayah Provinsi Jawa Timur, maka pada dasarnya setiap daerah akan dikembangkan kawasan industri. Area industrialisasi di Jawa Timur masih terbuka bagi investor, kondisi tersebut dapat ditunjukan adanya kawasan industri yang berkembang di wilayah pantura dan wilayah selatan Jawa Timur. Sektor industri yang berpotensi untuk dikembangkan adalah industri perikanan, industri manufaktur, industri pertambangan.

Gambar 1.15
Peta Persebaran Kawasan Industri di Jawa Timur



Sumber : RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031

Potensi pengembangan kawasan industri baru di Jawa Timur sangat besar terutama di wilayah pantura serta sekitar Surabaya. Meskipun demikian beberapa wilayah lain juga potensial untuk mengembangkan kawasan industri terutama wilayah yang memiliki aksesibilitas laut dan udara besar. Berbagai industri pengolah hasil alam lebih cenderung kewilayah utara Jawa Timur, diantaranya pengembangan kawasan industri Tuban, diarahkan pengembangan di wilayah utara dan selatan sebagai pengembangan industri semen, dan petrochemical dengan ditunjang oleh adanya pelabuhan, pengembangan kawasan industri Lamongan, diarahkan pengembangan di wilayah utara sebagai pengembangan industri manufaktur, pengalengan ikan, kawasan penunjang kegiatan dilepas pantai (Shorebase), pengembangan kawasan industri Banyuwangi, diarahkan pengembangan di wilayah timur selatan, sebagai pengembangan industri perikanan, pengembangan kawasan industri wilayah selatan, diarahkan di wilayah Kabupaten Jember tepatnya di Puger dan di wilayah Kabupaten Trenggalek tepatnya di Prigi sebagai pengembangan kawasan industri perikanan, pengembangan kawasan industri Madiun, diarahkan sebagai pengembangan industri perkeretaapian dengan melibatkan masyarakat

pengrajin, pergudangan, pengembangan kawasan industri Bangkalan, diarahkan sebagai kawasan industri pengolahan, pergudangan.

Pengembangan kawasan industri di Jawa Timur didasarkan kecenderungan perkembangan lokasi kawasan industri di Jawa Timur saat ini dan potensi kawasan. Pengembangan kawasan industri skala besar berdampak penting terhadap perkembangan wilayah dalam arti berhubungan dengan pangsa pasar ekspor dikonsentrasikan di sekitar pantai utara Jawa, Surabaya, Mojokerto, Gresik, Sidoarjo pada kawasan gerbangkertosusila. Industri kimia dasar berdampak penting terhadap pembangunan dan perkembangan wilayah, seperti industri semen, farmasi, bahan makanan, serta petro kimia dapat dikonsentrasikan di Surabaya, Gresik, Mojokerto, Pasuruan, Tuban, dan Lamongan.

3. Wilayah Rawan Bencana

Kawasan rawan bencana alam merupakan kawasan yang diindikasikan sebagai kawasan yang sering terjadi bencana. Di wilayah Provinsi Jawa Timur, kawasan rawan bencana dikelompokkan dalam kawasan rawan bencana tanah longsor, kawasan rawan bencana gelombang pasang, kawasan rawan bencana banjir dan kawasan rawan bencana kebakaran hutan serta kawasan rawan angin kencang dan puting beliung. Dengan adanya bencana ini dapat berakibat rusaknya lingkungan secara menyeluruh. Dengan demikian harus melakukan antisipasi terhadap bencana yang setiap saat dapat terjadi, melalui pembentukan suatu tatanan baik upaya deteksi gempa, melestarikan kawasan lindung dan kegiatan penanggulangan bencana secara dini.

3.1 Wilayah Rawan Bencana Tanah Longsor

Tanah longsor merupakan salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan, ataupun percampuran keduanya, menuruni atau keluar lereng akibat dari terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng tersebut. Ada 6 jenis tanah longsor, yakni: longsor translasi, longsor rotasi, pergerakan blok, runtuh batu, rayapan tanah, dan aliran bahan rombakan. Jenis longsor translasi dan rotasi

paling banyak terjadi di Indonesia. Sedangkan longsoran yang paling banyak memakan korban jiwa manusia adalah aliran bahan rombakan. Wilayah rawan longsor di Jawa Timur dengan potensi gerakan tanah menengah-tinggi sebagaimana tabel berikut.

Tabel 1.6
Wilayah Potensi Tanah Longsor di Provinsi Jawa Timur

KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	POTENSI GERAKAN TANAH
Kabupaten Ngawi	Widodaren, Jogorogo Pitu, Kedunggalar, Paron	Menengah-Tinggi
Kabupaten Tuban	Bancar, Tambakboyo, Kerek, Rengel, Montong	Menengah
Kabupaten Bojonegoro	Ngambon, Purwosari	Menengah
Kabupaten Magetan	Poncol, Magetan, Panekan, Plaosan, Parang	Menengah-Tinggi
Kabupaten Madiun	Kare, Gemarang, Wungu, Dagangan	Menengah-Tinggi
Kabupaten Nganjuk	Loceret, Gondang, Sawahan	Menengah
Kabupaten Ponorogo	Ngrayun, Sawoo, Sampung, Sambit, Slahung, Bungkal, Badegan, Soko, Mlarak, Pulung, Ngebel	Menengah-Tinggi
Kabupaten Pacitan	Nawangan, Bandar, Tegalombo, Ngadirejo Tulakan, Arjosari, Kebonagung, Pacitan Pringkuku, Punung, Donorejo	Menengah-Tinggi
Kabupaten Trenggalek	Bendungan, Munjungan, Tugu, Durenan, Karangan, Pule, Panggul, Dongko, Kampak, Watulimo, Munjungan	Menengah-Tinggi
Kabupaten Kediri	Grogol, Semen, Mojo	Menengah-Tinggi
Kabupaten Tulungagung	Pagerwojo, Sendang, Kauman, Karangrejo, Bandung, Kalidawir, Rejotangan, Besuki	Menengah-Tinggi
Kabupaten Blitar	Bakung, Wonotirto, Kademangan, Sutojayan, Panggungrejo	Menengah-Tinggi
Kabupaten Malang	Poncokusumo, Jabung, Sumberma Njing, Batu, Pau, Kalipare	Menengah
Kabupaten Lumajang	Tempursari, Pronojiwo, Senduro, Randugung, Klakah	Menengah-Tinggi
Kabupaten Pasuruan	Lumbang, Tutur, Tolasari	Menengah
Kabupaten Probolinggo	Lumbang, Sukapura, Sumber, Gading, Krucil	Menengah-Tinggi
Kabupaten Jember	Panti, Tempurejo, Tanggul, Jeblug, Bangsalsari, Arjasa, Rambipuji,	Menengah-Tinggi

KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	POTENSI GERAKAN TANAH
	Munjulsari, Sukorambi	
Kabupaten Situbondo	Bungatan, Sumbermalang, Jatibanteng, Banyuglugur, Kendit	Menengah-Tinggi
Kabupaten Bondowoso	Pakem, Curah Dami, Grujugan, Maesan, Klabang	Menengah-Tinggi
Kabupaten Banyuwangi	Kalipiro, Wongsorejo	Menengah-Tinggi
Kota Batu	Junrejo, Batu, Bumiaji	Menengah-Tinggi

Sumber : RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031

Keterangan:

Menengah : Daerah yang mempunyai potensi Menengah untuk terjadi Gerakan Tanah. Pada Zona ini dapat terjadi gerakan tanah jika curah hujan diatas normal, terutama pada daerah yang berbatasan dengan lembah sungai, gawir, tebing jalan atau jika lereng mengalami gangguan.

Tinggi : Daerah yang mempunyai potensi Tinggi untuk terjadi Gerakan Tanah. Pada Zona ini dapat terjadi Gerakan Tanah jika curah hujan diatas normal, sedangkan gerakan tanah lama dapat aktif kembali.

3.2 Wilayah Rawan Gelombang Pasang

Gelombang pasang merupakan gelombang yang ditimbulkan oleh gaya tarik menarik antara bumi dengan planet-planet lain terutama dengan bulan dan matahari, gelombang ini mempunyai periode sekitar 12,4 jam dan 24 jam. Menurut PP No 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional kriteria kawasan rawan gelombang pasang adalah kawasan sekitar pantai yang rawan terhadap gelombang pasang dengan kecepatan antara 10 sampai dengan 100 kilometer per jam yang timbul akibat angin kencang atau gravitasi bulan atau matahari. Kawasan rawan gelombang pasang di Provinsi Jawa Timur berada di kawasan sepanjang pantai di wilayah Jawa Timur baik yang berbatasan dengan Laut Jawa, Selat Bali, Selat Madura, Samudera Hindia maupun di kawasan kepulauan.

3.3 Wilayah Rawan Bencana Banjir

Banjir adalah suatu keadaan sungai, dimana aliran sungai tidak tertampung oleh palung sungai, sehingga terjadi limpasan dan atau genangan pada lahan yang semestinya kering. Menurut PP No 26 Tahun 2008 Tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, kriteria kawasan rawan banjir adalah kawasan yang diidentifikasi sering dan/atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam banjir. Lokasi dengan potensi banjir di Jawa Timur dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.7
Lokasi Potensi Banjir di Provinsi Jawa Timur

Kabupaten/Kota	Area/Kecamatan	Tingkat Potensi Banjir
Bangkalan	Bangkalan	Potensi Menengah
Banyuwangi	Glagah	Potensi Menengah
Blitar	Udanawu, Ponggok, Bakung, Kesamben	Potensi Menengah
Bojonegoro	Kasiman, Padangan, Kalitidu, Bojonegoro	Potensi Menengah
Bondowoso	Grujugan, Tegalampel, Cerme	Potensi Menengah
Gresik	Gresik	Potensi Tinggi
Jember	Silo	Potensi Menengah
Jombang	Megaluh	Potensi Menengah
Kediri	Semen, Grogol, Pagu, Pare, Puncu, Wates	Potensi Menengah
Lamongan	Sekaran, Babat, Laren, Karanggeneng, Deket, Lamongan, Sukodadi	Potensi Tinggi
Lumajang	Tempeh, Tempursari, Pronojiwo	Potensi Menengah
Madiun	Kebonsari, Sawahan, Wonosari	Potensi Menengah
Magetan	Plaosan, Bendo, Kawedanan	Potensi Menengah
Malang	Kepanjen, Pakisaji	Potensi Menengah
Mojokerto	Jatiroto, Mojokerto, Bangsal, Mojosari, Pungging	Potensi Menengah
Nganjuk	Rejoso	Potensi Menengah
Ngawi	Ngrambe, Padas	Potensi Menengah
Pacitan	Ngadirojo, Kebonagung	Potensi Menengah
Pasuruan	Purwosari, Kraton	Potensi Menengah
Ponorogo	Jetis, Kauman, Siman	Potensi Menengah
Probolinggo	Kota Anyar, Paiton	Potensi Menengah
Sampang	Sreseh, Jrengik, Sampang	Potensi Menengah
Sidoarjo	Krian, Taman, Sidoarjo	Potensi Menengah
Situbondo	Sumbermalang, Situbondo	Potensi Menengah
Sumenep	Sumenep	Potensi Rendah
Trenggalek	Pule	Potensi Menengah
Tuban	Jatirogo, Bancar, Tuban	Potensi Menengah
Tulungagung	Pagerwojo, Gondang, Kalidawir	Potensi Menengah
Kota Pasuruan	Rejoso	Potensi Rendah
Kota Surabaya	sebagian besar wilayah Kota Surabaya	Potensi Menengah
Kota Malang	Wilayah Kota Bagian tengah dan timur	Potensi Rendah

Sumber : RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031

3.4 Wilayah Rawan Kebakaran Hutan

Kebakaran hutan merupakan peristiwa dimana terbakarnya hutan atau adanya titik-titik api/panas yang rentan terbakar. Kebakaran hutan secara alami umumnya disebabkan oleh faktor cuaca dan iklim, aliran magma/lava/lahar dari letusan gunungberapi, maupun pada lahan gambut. Kawasan rawan bencana kebakaran hutan dan angin kencang di Jawa Timur meliputi kawasan di Gunung Arjuno, Gunung Kawi, Gunung Welirang dan Gunung Kelud dan kawasan-kawasan dengan potensi angin puting beliung.

3.5 Kawasan Rawan Bencana Alam Geologi

Kawasan rawan bencana alam geologi di Provinsi Jawa Timur meliputi kawasan rawan bencana letusan gunung api, kawasan rawan gempa bumi, kawasan rawan bencana tsunami dan kawasan rawan luapan lumpur.

➤ Wilayah Rawan Letusan Gunung Api

Gunung api adalah bentuk timbunan (kerucut dan lainnya) di permukaan bumi yang dibangun oleh timbunan rempah letusan, atau tempat munculnya batuan lelehan (magma)/rempah lepas/gas yang berasal dari bagian dalam bumi. Bahaya letusan gunung api dibagi dua berdasarkan waktu kejadiannya, yaitu bahaya utama/primer (awan panas, lontaran batu, hujan abu lebat, leleran lava, dan gas beracun) dan bahaya ikutan/sekunder (terjadi setelah proses peletusan berlangsung : banjir bebatuan dan lahar)

Kawasan rawan letusan gunung api di Jawa Timur berada pada lereng gunung api yang masih aktif. Terdapat 7 (tujuh) gunung api aktif di Jawa Timur serta lokasi yang merupakan wilayah rawan bencana letusan. Kawasan yang diindikasikan dapat meletus/mengeluarkan lava, asap beracun dan mengeluarkan debu pasir, meliputi :

Tabel 1.8
Kawasan Rawan Letusan Gunung Api di Provinsi Jawa Timur

No	Gunung Api	Kabupaten/Kota	Lokasi Pos Pengamatan
1	Ijen	Bondowoso dan Banyuwangi	Pos pengamatan Gunung Api Kawah Ijen, Dusun Panggung Sari, Desa taman Sari, Licin, Kec. Glagah, Kab.Banyuwangi
2	Semeru	Malang dan Lumajang	Pos Pengamatan Gunung Api di Gunung

No	Gunung Api	Kabupaten/Kota	Lokasi Pos Pengamatan
			Sawur Desa Sumber Wuluh, Kecamatan Candipuro, Kab.Lumajang.
3	Bromo	Malang, Lumajang, Probolinggo dan Pasuruan	Pos Pengamatan Gunung Api di Cemoro Lawang Desa Ngadisari, Kec. Sukapura, Kab.Probolinggo
4	Lamongan	Lumajang dan Probolinggo	Pos Pengamatan di Desa Tegalrandu, Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang.
5	Arjuno-Welirang	Pasuruan dan Mojokerto	Pos Pengamatan Gunung Api di Kasiman, Desa Sukoreno, Kecamatan prigen, Kabupaten Pasuruan
6	Kelud	Kediri, Blitar dan Malang	Pos Pengamatan Gunung Api di Dusun Margomulyo, Desa Sugih Waras, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri
7	Raung	Banyuwangi, Bondowoso dan Jember	Pos Pengamatan Gunung Api di Kp.Mang Desa Sragi, Kecamatan Songon Kabupaten Banyuwangi

Sumber : RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031

➤ Wilayah Gempa Bumi

Kawasan Rawan Gempa bumi merupakan kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana gempa bumi yang mengakibatkan berguncangnya bumi disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif aktivitas gunung api atau runtuh batuan. Kekuatan gempa bumi akibat aktivitas gunung api dan runtuh batuan relatif kecil sehingga kita akan memusatkan pembahasan pada gempa bumi akibat tumbukan antar lempeng bumi dan patahan aktif. Gempa bumi berlaku setiap hari di bumi, tetapi umumnya berskala kecil, sehingga tidak menyebabkan kerusakan. Gempa bumi yang kuat mampu menyebabkan kerusakan dan kehilangan nyawa yang besar melalui beberapa cara termasuk retakan pecah (fault rupture), getaran bumi (gegaran) banjir disebabkan oleh tsunami, lempengan pecah, berbagai jenis kerusakan muka bumi kekal seperti tanah runtuh, tanah lembik, dan kebakaran atau pelepasan bahan beracun.

Kriteria kawasan rawan gempa menurut PP No 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional adalah kawasan yang berpotensi dan/atau pernah mengalami gempa bumi dengan skala VII sampai dengan XII Modified Mercally Intensity (MMI). Kawasan rawan bencana gempa bumi di Provinsi Jawa Timur berada di wilayah: Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Blitar, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Jember, Kabupaten Jombang, Kabupaten Kediri, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Malang, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung.

➤ **Wilayah Rawan Tsunami**

Penetapan wilayah rawan tsunami didasarkan pada angka kejadian di masa lalu serta keberadaan lempeng tektonik. Berdasarkan kondisi geologi, selain kaya akan sumberdaya alam wilayah selatan Jawa juga merupakan daerah dengan tingkat kerawanan yang tinggi terhadap bencana alam, seperti rawan gempa tektonik dan vulkanik disepanjang “ring of fire” yang melintasi Sumatra – Jawa – Bali – Nusa Tenggara – Banda – Maluku yang berdampak terhadap adanya bencana tsunami. Tingkat resiko tsunami di Jawa timur diklasifikasikan menjadi:

- Resiko Tinggi tsunami, meliputi Kabupaten Pacitan, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Malang, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Jember, dan Kabupaten Banyuwangi.
- Resiko Sedang tsunami, meliputi Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Gresik, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten/Kota Pasuruan, Kabupaten/Kota Probolinggo, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, dan Kabupaten Sumenep.
- Resiko Rendah tsunami, meliputi Kabupaten Ngawi, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Magetan, Kabupaten/Kota Madiun, Kabupaten

Ponorogo, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Jombang, Kabupaten/Kota Kediri, Kabupaten/Kota Mojokerto, dan Kabupaten Bondowoso.

➤ **Wilayah Rawan Luapan Lumpur**

Kawasan luapan lumpur meliputi area terdampak dari bahaya luapan lumpur, polusi gas beracun, dan penurunan permukaan tanah (land subsidence) di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Arahan pengelolaan kawasan luapan lumpur dibagi menjadi:

- Penanganan luapan lumpur meliputi :
 - ✓ Peningkatan kapasitas tampungan kolam lumpur berfungsi melindungi permukiman dan infrastruktur vital.
 - ✓ Pemanfaatan debit Kali Porong yang cukup besar di musim hujan untuk melancarkan aliran endapan lumpur.
- Penanganan infrastruktur sekitar semburan lumpur meliputi:
 - ✓ Penanganan sistem drainase dengan memperbaiki atau membuat saluran drainase baru
 - ✓ Normalisasi saluran drainase utama
 - ✓ Perbaikan jalan lingkungan untuk mengurangi beban lalu lintas di Jalan Arteri Porong
 - ✓ Perbaikan sebagian ruas Jalan Arteri Porong.
 - ✓ Peningkatan jalan alternatif lainnya sepanjang ± 14 km untuk mengurangi beban lalu lintas di Jalan Arteri Porong.
 - ✓ Pengadaan tanah untuk pembangunan jalan bebas hambatan Surabaya – Gempol, dan
 - ✓ Konstruksi relokasi pipa air baku PDAM Kota Surabaya
- Pengamanan Kali Porong meliputi:
 - ✓ Penjagaan kapasitas pengaliran Kali Porong.
 - ✓ Penjagaan keamanan tanggul dan tebing sungai dengan
 - ✓ Memasang perlindungan tebing sungai/tanggul.
- Penanganan dampak sosial akibat luapan lumpur meliputi:

- ✓ Pemberian bantuan sosial kepada masyarakat yang terkena dampak luapan lumpur maupun penurunan tanah;
- ✓ Perlindungan sosial terhadap hak-hak atas harta benda miliknya yang hilang atau berkurang karena dampak luapan lumpur; dan
- ✓ Pemulihan sosial masyarakat yang terkena luapan lumpur.

3.6 Kawasan Rawan Kekeringan

Kawasan Rawan Kekeringan merupakan kawasan yang berpotensi tinggi mengalami bencana kekeringan berhubungan dengan ketersediaan air yang jauh dibawah kebutuhan air baik untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi dan lingkungan. Kekeringan dapat diklasifikasikan menjadi :

➤ Kekeringan Alamiah, meliputi:

- Berhubungan dengan kekurangan kandungan air di dalam tanah sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan tanaman tertentu pada periode waktu tertentu Kekeringan Meteorologis berkaitan dengan tingkat curah hujan di bawah normal dalam satu musim;
- Kekeringan Hidrologis berkaitan dengan kekurangan pasokan air permukaan dan air tanah;
- Kekeringan Pertanian pada wilayah yang luas;
- Kekeringan Sosial Ekonomi berkaitan dengan kondisi dimana pasokan komoditi ekonomi kurang dari kebutuhan normal akibat kekeringan meteorologi, hidrologi, dan pertanian

➤ Kekeringan Antropogenik adalah kekeringan yang disebabkan karena ketidakpatuhan pada aturan, terjadi karena :

- Kebutuhan air lebih besar dari pasokan yang direncanakan akibat ketidakpatuhan pengguna terhadap pola tanam/pola penggunaan air;
- Kerusakan kawasan tangkapan air, sumber air akibat perbuatan manusia

Gejala terjadinya kekeringan sebagai berikut :

- Kekeringan berkaitan dengan menurunnya tingkat curah hujan dibawah normal dalam satu musim. pengukuran kekeringan Meteorologis merupakan indikasi pertama adanya bencana kekeringan;

- Terjadinya kekurangan pasokan air permukaan dan air tanah. Kekeringan ini diukur berdasarkan elevasi muka air sungai, waduk, danau dan air tanah. Kekeringan Hidrologis bukan merupakan indikasi awal adanya kekeringan;
- Kekeringan pada lahan pertanian ditandai dengan kekurangan kandungan air di dalam tanah sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan tanaman tertentu pada periode waktu tertentu pada wilayah yang luas yang menyebabkan tanaman menjadi kering dan mengering.

Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2012, tingkat resiko bencana kekeringan terbagi dalam:

- Resiko Kekeringan Rendah, meliputi Kota Madiun, dan Kota Kediri
- Resiko Kekeringan Sedang, meliputi Kabupaten Tuban, Kabupaten Magetan, Kabupaten Madiun, Kabupaten Kediri, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Kota Mojokerto, Kota Blitar, dan Kota Batu.
- Resiko Kekeringan Tinggi, meliputi Kabupaten Ngawi, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Jombang, Kabupaten Gresik, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Blitar, Kabupaten/Kota Malang, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Jember, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, dan Kabupaten Sumenep

4. Demografi

4.1 Perkembangan Penduduk

Jawa Timur mengalami kenaikan jumlah penduduk setiap tahun. Rata-rata pertumbuhan selama kurun waktu 2013–2016 sebesar 0,63 persen per-tahun. Tahun 2016 pertumbuhan penduduk melandai hanya sebesar 0,59 persen, terendah dalam empat tahun terakhir. Jumlah penduduk pada tahun 2016 sebesar 39.08 juta jiwa terdiri dari 19.29 juta laki-laki dan 19.79 juta jiwa perempuan. Sex ratio penduduk sebesar 97,48, artinya setiap per 100 orang

perempuan terdapat laki-laki sebanyak 97,98 orang. Rata-rata kepadatan penduduk Jawa Timur mencapai 815 jiwa per km². Kota Surabaya merupakan wilayah terpadat, dengan kepadatan 8.166 jiwa per km². Sedangkan terendah tercatat di Banyuwangi dengan kepadatan 277 jiwa per km². Umumnya daerah perkotaan mempunyai kepadatan lebih tinggi dibanding perdesaan.

Tabel 1.9
Indikator Kependudukan di Provinsi Jawa Timur

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Penduduk (000 Jiwa)	38.107	38.363	38.610	38.847	39.075
2	Pertumbuhan Penduduk (%)	0,70	0,67	0,64	0,61	0,59
3	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)	794	800	805	810	815
4	Sex Ratio (L/P) (%)	97,46	97,43	97,4	97,44	97,48

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Distribusi penduduk usia muda tercatat sebesar 22,97 persen, usia produktif sebesar 69,46 persen dan usia tua sebesar 7,63 persen. Dan mulai tahun 2011 hingga tahun 2016 angka ketergantungan penduduk menunjukkan terus menurun. Pada tahun 2012 angka ketergantungan tercatat 45,26 dan menurun menjadi 43,97 di tahun 2016. Capaian tahun 2016 menunjukkan bahwa setiap 100 orang berusia produktif menanggung sebanyak 43,44 orang usia tidak produktif. Keberhasilan program keluarga Berencana di Jawa Timur merupakan salah satu penyebab menurunnya angka ketergantungan penduduk.

4.2 Ketenagakerjaan

Dampak krisis global yang mencapai puncaknya pada medio 2015 yang lalu sangat dirasakan oleh seluruh negara di dunia dan tidak terkecuali negara Indonesia yang ditunjukkan dengan adanya perlambatan pertumbuhan ekonomi. Melemahnya perekonomian dunia secara global tak urung membuat ekspor Indonesia ikut menjadi lesu dan sangat mempengaruhi iklim investasi di Indonesia. Hingga Agustus 2016 ini, sepertinya para pengusaha masih harus mengatur siasat dan strategi agar mampu survive dari krisis yang salah satunya bisa berdampak terhadap pasar tenaga kerja. Walaupun tenaga kerja merupakan faktor produksi yang penting dalam proses produksi, namun dalam kondisi krisis

maka pilihan untuk efisiensi tenaga kerja dari mulai melakukan pemotongan upah bahkan hingga pengurangan tenaga kerja terkadang tidak bisa dihindarkan oleh para pengusaha. Dari sisi investasi pun, kondisi krisis dapat mendorong para investor untuk lebih selektif dalam melakukan investasi di suatu wilayah.

Di sisi supply tenaga kerja, akibat tekanan perekonomian yang dirasa semakin berat oleh masyarakat akan menjadi faktor pendorong seseorang untuk ikut aktif di pasar kerja guna memperoleh penghasilan maupun tambahan penghasilan bagi rumah tangganya sebagai bagian dari upaya untuk meringankan beban rumah tangganya tersebut. Dalam situasi seperti ini maka kecenderungan adanya penambahan angkatan kerja atau orang yang aktif di dalam pasar kerja baik yang sudah memiliki pekerjaan maupun yang sedang mencari pekerjaan akan terus meningkat. Namun, semakin ketatnya para pengusaha untuk berinvestasi maupun bisa survive dari krisis dapat berakibat terhadap semakin ketatnya persaingan para angkatan kerja tersebut untuk memperoleh pekerjaan. Salah satu dampak yang harus dihadapi oleh pemerintah pada situasi seperti ini adalah kekhawatiran munculnya permasalahan ketenagakerjaan yaitu kemungkinan semakin tingginya tingkat pengangguran di wilayah tersebut.

Tabel 1.10
Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama
Jawa Timur Tahun 2012–2016

NO	JENIS KEGIATAN UTAMA	SATUAN	Tahun				
			2012	2013	2014	2015	2016
1	Angkatan Kerja	Ribu Orang	20.238,06	20.432,45	20.149,99	20.274,68	19.953,84
	> Berkerja	Ribu Orang	19.411,26	19.553,91	19.306,51	19.367,78	19.114,56
	> Pengangguran	Ribu Orang	826,80	878,54	843,49	906,9	839,28
2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	69,57	69,78	68,12	67,84	66,14
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	4,09	4,3	4,19	4,47	4,21
4	Pekerja Tidak Penuh	Ribu Orang	6.390,92	6.472,06	6.481,52	6.244,39	5.602,67
	> Setengah Penganggur	Ribu Orang	2.245,22	1.946,38	1.674,50	1.628,96	1.340,28
	> Paruh Waktu	Ribu Orang	4.145,70	4.526,68	4.807,02	4.615,43	4.262,39

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Keadaan perekonomian dunia dan Indonesia serta kondisi dunia usaha dan pasar kerja tersebut jelas tergambar dalam keadaan ketenagakerjaan di Jawa Timur yang terefleksi dari hasil pendataan Survei Angkatan Kerja Nasional

(Sakernas) yang telah dilaksanakan pada bulan Agustus 2016. Jumlah angkatan kerja di Jawa Timur pada Agustus 2015 sempat mengalami peningkatan di banding periode sebelumnya hingga 20,27 juta orang, namun pada Agustus 2016 turun secara signifikan menjadi 19,95 juta orang. Hal ini menunjukkan bahwa dari sisi angkatan kerja, telah terjadi penurunan sekitar 321 juta orang. Dari sisi penyerapan angkatan kerja pun, pada Agustus 2016 tercatat adanya penurunan penyerapan tenaga kerja hingga menjadi 19,11 juta orang atau tenaga kerja yang terserap di berbagai sektor/lapangan pekerjaan berkurang sebesar 253 ribu orang jika dibandingkan dengan kondisi pada Agustus 2015. Tentunya hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi investasi di Jawa Timur.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Timur pada Agustus 2016 sedikit meningkat sebesar 63 ribu orang dibanding Februari 2016, dari 4,14 persen menjadi 4,21 persen. Tetapi jika dibanding Agustus 2015 sebesar 4,47 persen, masih turun sebanyak 68 ribu orang. Penyebab bertambahnya tingkat pengangguran di Jatim dapat disebabkan karena masih adanya kesenjangan antara supply tenaga kerja yang tersedia dengan demand atau kebutuhan perusahaan/usaha, minimnya informasi tentang tenaga kerja yang tersedia maupun kebutuhan dunia usaha dari sisi kualitas tenaga kerja termasuk di dalamnya tentang kondisi tenaga kerja di Jatim yang dapat dikatakan relatif masih rendah yang tercermin dari kualitas pendidikan yang dimiliki oleh tenaga kerja di Jawa Timur. Menurunnya angkatan kerja, berdampak pada Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Pada Agustus 2014, TPAK Jawa Timur tercatat mencapai angka 68,12 persen. Sedangkan Agustus 2015 sebesar 67,84 persen dan pada Agustus 2016 turun lagi menjadi 66,14 persen. Secara umum, angka ini menunjukkan bahwa 66,14 persen penduduk Jatim yang berusia 15 tahun ke atas memutuskan untuk ikut aktif di pasar kerja. Sedangkan 33,86 persen sisanya memutuskan untuk fokus sekolah, mengurus rumah tangga, maupun memiliki kegiatan di luar kegiatan ekonomi seperti kaum lanjut usia (lansia).

4.3 Penduduk Menurut Agama

Agama merupakan salah satu hak asasi paling dasar dari manusia yang diakui oleh negara Republik Indonesia. Hak untuk memilih dan menyakini sebuah

doktrin keagamaan tersebut, lahir secara otomatis ketika tiap manusia menjalani kehidupannya baik secara individu maupun sebagai bagian dari komunitas masyarakat tertentu.

Berdasarkan data Kanwil Departemen Agama Jawa Timur, penduduk Jawa Timur mayoritas beragama Islam 94,35 persen, diikuti Kristen Protestan 3,02 persen, Khatolik 1,17 persen, Hindu 0,93 persen, Budha 0,48 persen dan Konghucu 0,02 persen.

4.4 Pendidikan

Pendidikan merupakan isu sentral dalam pembangunan yang berpusat pada rakyat, karena salah satu premis pentingnya adalah memperbesar pilihan bagi rakyat. Pendidikan diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan serta kemampuan sumber daya manusia, untuk kemudian dapat dimanfaatkan berpartisipasi dalam proses pembangunan. Meningkatnya Angka Rata-rata Lama Sekolah, Angka Melek Huruf, Angka Partisipasi Kasar (APK), dan Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan suatu indikator kunci keberhasilan pembangunan pendidikan. Meningkatnya Angka Melek Huruf yang menjadi sasaran global dan nasional dari 95,49 persen tahun 2014 menjadi 96,06 (angka sementara) persen tahun 2016. Selanjutnya membaiknya angka rata-rata lama sekolah 25 tahun keatas sebagai gambaran tingkat pendidikan penduduk yang mencapai angka 7,23 pada tahun 2016. Demikian pula untuk Angka Partisipasi Kasar (APK), dan Angka Partisipasi Murni (APM) yang menunjukkan meningkat pada semua jenjang pendidikan

D. KONDISI EKONOMI

1. Pertumbuhan Ekonomi

➤ PDRB Menurut Lapangan Usaha

Perekonomian Jawa Timur Tahun 2016 tumbuh sebesar 5,55 persen. Dari sisi produksi, semua kategori mengalami pertumbuhan positif. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Pertambangan dan Penggalian sebesar 14,18 persen; diikuti Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 8,49 persen; Informasi dan

Komunikasi sebesar 7,57 persen; Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 6,99 persen; dan Jasa Pendidikan sebesar 5,97 persen.

Struktur perekonomian Jawa Timur menurut lapangan usaha tahu 2016 didominasi oleh tiga lapangan usaha utama yaitu Industri Pengolahan dengan kontribusi sebesar 28,92 persen; Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 13,31 persen; dan Perdagangan Besar-Eceran dan Reparasi Mobil- Sepeda Motor sebesar 18,00 persen. Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhannya, lapangan usaha Industri Pengolahan memiliki sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 1,33 persen, diikuti Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 1,06 persen; Pertambangan dan Penggalan 0,70 persen; serta Konstruksi sebesar 0,46 persen. Peran Kategori Pertambangan dan Penggalan semakin meningkat sejak memasuki tahun 2016. Hal ini terutama didorong oleh kinerja Subkategori Pertambangan Minyak dan Gas Bumi yang meningkat cukup signifikan. Meningkatnya pertumbuhan Kategori Pertambangan dan Penggalan ini pula yang merupakan salah satu pendorong perekonomian Jawa Timur tumbuh lebih baik dibanding tahun 2015.

Pada triwulan IV-2016 Ekonomi Jawa Timur tumbuh 5,48 persen bila dibandingkan triwulan IV-2015 (y-on-y). Pertumbuhan terjadi pada semua lapangan usaha. Pertambangan dan Penggalan merupakan lapangan usaha yang memiliki pertumbuhan tertinggi sebesar 18,72 persen, diikuti Informasi dan Komunikasi sebesar 7,95 persen dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 6,16 persen. Struktur perekonomian Jawa Timur menurut lapangan usaha triwulan IV-2016 didominasi oleh tiga lapangan usaha utama yaitu: Kategori Industri Pengolahan (29,18 persen); Kategori Perdagangan Besar-Eceran dan Reparasi Mobil-Sepeda Motor (18,12 persen) dan Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (10,87 persen). Sumber utama pertumbuhan ekonomi Jawa Timur Triwulan IV-2016 adalah Industri Pengolahan sebesar 1,47 persen, diikuti Perdagangan Besar-Eceran dan Reparasi Mobil-Sepeda Motor sebesar 0,98 persen dan Pertambangan dan Penggalan sebesar 0,94 persen.

Ekonomi Jawa Timur triwulan IV-2016 mengalami kontraksi 2,04 persen bila dibandingkan triwulan sebelumnya (q-to-q). Kondisi ini disebabkan oleh

beberapa kegiatan pertanian sudah melewati masa panen, sehingga terjadi penurunan produksi pada triwulan IV, seperti padi dan palawija, hortikultura dan perkebunan. Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mengalami kontraksi sebesar 25,58 persen akibat menurunnya produksi Subkategori Tanaman Pangan dan Perkebunan yang mengalami kontraksi masing-masing sebesar 50,24 persen dan 42,52 persen. Kategori Industri Pengolahan tumbuh 0,43 persen, sedangkan Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor tumbuh -1,20 persen. Sementara itu, lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tinggi diantaranya Pengadaan Listrik, Gas, dan Produksi Es, tumbuh 8,37 persen dan memberikan sumber pertumbuhan sebesar 0,02 persen; diikuti Konstruksi yang tumbuh 8,36 persen dengan sumber pertumbuhan sebesar 0,75 persen.

Perekonomian Jawa Timur Tahun 2016 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp 1.855,04 triliun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan mencapai Rp 1.405,24 triliun.

➤ **PDRB Menurut Pengeluaran**

Dari sisi pengeluaran, perekonomian Jawa Timur tahun 2016 mengalami pertumbuhan sebesar 5,55 persen. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen ekspor luar negeri yaitu sebesar 12,83 persen. Pertumbuhan tertinggi berikutnya adalah komponen net ekspor antar daerah sebesar 9,58 persen. Kemudian komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB), pengeluaran konsumsi LNPRT, pengeluaran konsumsi rumah tangga dan impor luar negeri yang masing-masing tumbuh sebesar 6,02 persen; 5,87 persen; 4,55 persen dan 0,02 persen. Sementara komponen pengeluaran konsumsi pemerintah mengalami kontraksi sebesar 7,01 persen.

Struktur PDRB Jawa Timur menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku masih didominasi oleh komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga yang mencapai lebih dari separuh PDRB Jawa Timur (59,71 persen), komponen lain yang memiliki peranan besar terhadap PDRB Jawa Timur berturut-turut adalah PMTB (28,75 persen), impor luar negeri (17,71 persen), ekspor luar negeri

(14,21 persen), pengeluaran konsumsi pemerintah (6,33 persen), net ekspor antar daerah (7,03 persen), dan pengeluaran konsumsi LNPRT (1,20 persen).

Dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Jawa Timur tahun 2016, komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga mempunyai sumber pertumbuhan tertinggi yakni sebesar 2,76 persen; diikuti komponen ekspor luar negeri 1,83 persen, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) 1,65 persen, net ekspor antar daerah 0,67 persen, dan konsumsi LNPRT 0,06 persen.

Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada triwulan IV-2016 sebesar 5,48 persen bila dibandingkan triwulan IV-2015 (y-on-y). Pada triwulan ini komponen yang mengalami kontraksi komponen pengeluaran konsumsi LNPRT dan pemerintah yang masing-masing sebesar -0,21 persen dan 24,41 persen, hal ini dipengaruhi oleh tidak adanya pilkada baik di level provinsi maupun kabupaten/kota, sedangkan pada pemerintahan terjadi karena pengetatan anggaran terutama untuk belanja barang dan modal. Komponen-komponen yang lainnya mengalami pertumbuhan, tertinggi dialami oleh net ekspor antar daerah sebesar 58,68 persen, karena kegiatan bongkar muat barang dan peti kemas di pelabuhan tanjung perak meningkat, ekspor migas yang mencapai 23 persen serta liburan natal, akhir tahun dan anak sekolah meningkatkan jumlah wisatawan domestik berlibur ke Jawa Timur. Impor luar negeri juga tumbuh 12,15 persen dipengaruhi oleh impor gula, bahan kimia organik, perhiasan, mesin dan besi baja yang meningkat. Ekspor luar negeri tumbuh 9,69 persen, dipengaruhi oleh kenaikan ekspor barang komoditas tembaga, lemak nabati/hewani, tembakau dan kayu, serta naiknya jumlah wisatawan asing sebesar 11 persen dengan ditandai naiknya tingkat hunian kamar/hotel sebesar 7 persen. Pembentukan modal tetap bruto (PMTB) tumbuh 5,68 persen, walaupun terjadi perlambatan pada realisasi PMA dan PMDN akan tetapi pertumbuhan PMTB cenderung didorong oleh pengadaan semen yang naik sebesar 13 persen dan impor barang modal naik 21 persen. Pengeluaran konsumsi rumah tangga tumbuh 4,98 persen, karena dipengaruhi oleh pendapatan rumah tangga yang semakin membaik serta inflasi Jawa Timur yang relatif terkendali.

Pada triwulan IV-2016 pertumbuhan ekonomi Jawa Timur mengalami kontraksi sebesar 2,04 persen bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (q-to-q). Ini didukung oleh komponen konsumsi LNPRT sebesar 1,59 persen dan pengeluaran konsumsi rumah tangga 0,01 persen. Pengeluaran konsumsi pada kegiatan sosial pasca hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha pada triwulan 3 relatif tidak terlalu signifikan. Komponen yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah komponen impor luar negeri sebesar 14,58 persen, kemudian pengeluaran konsumsi pemerintah sebesar 9,12 persen, net ekspor antar daerah 7,94 persen, ekspor luar negeri 4,27 persen dan PMTB 0,71 persen.

2. Inflasi

Sampai dengan bulan Desember 2016 secara tahunan kalender Inflasi Jawa Timur mencapai 2,74 persen. Ini berarti lebih rendah dibanding tahun-tahun sebelumnya bahkan merupakan inflasi tahunan yang paling rendah selama sepuluh tahun terakhir. Selain lebih baik dengan inflasi tahunan sebelumnya, inflasi tahun 2016 ini juga jauh lebih rendah jika dibanding dengan target pemerintah yang mematok angka inflasi sebesar 4 plus minus 1 persen.

Selama tahun 2016 dari tujuh kelompok pengeluaran, enam kelompok pengeluaran mengalami inflasi dan satu kelompok pengeluaran mengalami deflasi. Kelompok pengeluaran yang memberikan sumbangan terbesar terjadinya inflasi adalah kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau sebesar 1,08 persen, diikuti kelompok Bahan Makanan sebesar 0,62 persen, Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar sebesar 0,52 persen, kelompok Pendidikan, Rekreasi, dan Olah Raga sebesar 0,42 persen, kelompok Sandang sebesar 0,25 persen, dan andil terendah ialah kelompok Kesehatan sebesar 0,23 persen. Sedangkan kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi adalah kelompok Transport, Komunikasi, dan Jasa Keuangan yaitu sebesar 2,00 persen.

Komoditi utama yang memberikan sumbangan terbesar terhadap terjadinya inflasi sepanjang tahun 2016 di Jawa Timur adalah bawang merah, rokok kretek filter, bawang putih, cabai rawit, gula pasir, biaya sekolah dasar, emas perhiasan, rokok kretek dan biaya kontrak rumah. Sedangkan komoditi utama yang memberikan

sumbangan terbesar terhadap terjadinya deflasi ialah bensin, beras, daging ayam, semen, tarif ponsel, solar, tempe, telur ayam ras, bandeng, dan angkutan antar kota.

Komoditas bawang merah harganya di pasaran sangat berfluktuatif antar bulan hal ini tergantung dari pasokan bawang di pasaran. Kalau pasokan bawang merah tersendat baik karena gangguan produksi maupun gangguan distribusi akibat cuaca yang tidak mendukung dapat dipastikan harga bawang merah akan sangat tinggi. Selama 2016 tercatat beberapa kali komoditas bawang ini menjadi pemicu terjadinya inflasi yaitu pada bulan Januari, Maret, Juli, September dan November 2016. Selain bawang merah, bawang putih juga sering menjadi pendorong terjadinya inflasi. Sampai saat ini Indonesia masih membutuhkan impor bawang putih dari negara lain sehingga harga bawang putih masih tergantung dari harga bawang putih di luar negeri.

Selain bawang, cabai rawit juga harganya di pasaran sangat berfluktuatif antar bulan hal ini tergantung dari kondisi pasokan di pasaran. Karena produksi cabai ini juga tergantung dengan cuaca. Kalau pasokannya tersendat baik karena gangguan produksi maupun gangguan distribusi akibat cuaca maka dipastikan harga cabai rawit akan ikut terganggu. Selama 2016 tercatat beberapa kali komoditas cabai rawit ini menjadi pemicu terjadinya inflasi yaitu pada bulan Maret, Juli, Agustus, November dan Desember 2016.

Komoditas lain yang juga turut mempunyai andil besar dalam inflasi selama 2016 ialah komoditas rokok. Tingginya andil rokok baik rokok kretek maupun rokok kretek filter pada tahun ini merupakan dampak dari kebijakan pemerintah terkait harga rokok kretek dan rokok kretek filter melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 198/PMK.10/2015 tanggal 6 November 2015 tentang Perubahan Kedua PMK 179/PMK.011/2012 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau. Peraturan ini efektif mulai diberlakukan 1 Januari 2016.

Seperti disebutkan diatas bahwa selain beberapa komoditas mendorong terjadinya inflasi, beberapa komoditas lain justru mampu menahan laju inflasi selama 2016. Komoditas tersebut diantaranya ialah bensin, beras, daging ayam, semen, telepon seluler, solar, tempe, telur ayam ras, bandeng, dan angkutan antar kota. Penurunan harga BBM yang dilakukan pemerintah ternyata cukup efektif dalam

menahan laju inflasi selama 2016. Tercatat beberapa kali pemerintah mengambil kebijakan dengan menurunkan harga BBM pada awal dan pertengahan tahun 2016. Walaupun pada akhir tahun 2016 ini ada kenaikan sedikit namun harganya masih dibawah harga saat awal tahun 2016. Tercatat pada tanggal 20 Januari, 05 Februari dan 15 Maret 2016 pemerintah menurunkan harga BBM yaitu jenis Pertamina, Pertamina Plus dan Pertamina Dex. Pada pertengahan tahun yaitu 1 Agustus 2016 pemerintah kembali menurunkan harga jual BBM, kondisi ini bertahan hingga awal November 2016 dan Desember 2016 karena pada 1 November dan 16 Desember pemerintah kembali menaikkan harga BBM tersebut walaupun kenaikannya tidak besar.

Karena produksi semen di Indonesia selama 2016 surplus baik karena produsennya semakin banyak dan permintaan pasar juga tidak sebanding dengan suplay yang ada maka harga semen di 2016 juga cenderung turun. Turunnya harga semen ini juga ikut menjadi penghambat laju inflasi di tahun 2016. Sepanjang tahun 2016, komoditi emas perhiasan mengalami fluktuasi harga. Walaupun pada awal tahun harga emas sempat memicu terjadinya inflasi namun mulai pertengahan tahun hingga akhir tahun 2016 harganya terus terkoreksi. Menurunnya harga emas ini akibat dari penguatan mata uang Dolar Amerika di pasar global sehingga pergerakan angka harga emas di beberapa pasar di Jawa Timur juga menunjukkan tren yang menurun.

3. Perdagangan (Ekspor-Impor)

➤ Ekspor

Secara kumulatif, nilai ekspor Januari sampai Desember tahun 2016 mencapai USD 18.952,31 juta atau naik 10,70 persen dibanding ekspor periode yang sama tahun 2015 yang mencapai USD 17.120,18 juta.

Selama Januari sampai Desember 2016 ekspor migas mencapai USD 1.008,94 juta atau naik 61,64 persen dibanding ekspor migas periode yang sama tahun 2015 yang hanya mencapai USD 624,19 juta. Sedangkan ekspor non migas mencapai USD 17.943,37 juta atau naik sebesar 8,77 persen dibanding ekspor non migas periode yang sama tahun 2015 yang mencapai USD 16.495,99 juta.

Selama bulan Desember 2016 ekspor non migas Jawa Timur didominasi oleh lemak dan minyak hewan/nabati dengan nilai USD 148,66 juta, diikuti perhiasan/permata sebesar USD 126,63 juta, tembaga sebesar USD 108,22 juta, kayu dan barang dari kayu sebesar USD 107,91 juta, serta ikan dan udang sebesar USD 97,56 juta.

Negara tujuan ekspor produk non migas Jawa Timur bulan Desember 2016 yang terbesar adalah Jepang, dengan nilai ekspor mencapai USD 224,70 juta, diikuti Tiongkok dengan nilai ekspor sebesar USD 178,73 juta dan berikutnya adalah Amerika Serikat dengan nilai ekspor USD 178,70 juta. Sedangkan untuk negara ASEAN tujuan ekspor komoditi non migas utama Jawa Timur adalah Vietnam dengan nilai ekspor mencapai USD 82,42 juta, diikuti Malaysia dengan nilai USD 75,27 dan Singapura dengan nilai USD 65,88 juta, serta Thailand senilai USD 51,40 juta. Sementara untuk negara Uni Eropa tujuan utama ekspor Jawa Timur adalah Belanda dengan nilai ekspor sebesar USD 42,00 juta yang naik sebesar 33,79 persen dibanding bulan sebelumnya, dan Jerman senilai USD 25,69 juta serta Italia dengan ekspor sebesar USD 18,36 juta.

➤ **Impor**

Secara kumulatif, nilai impor Januari sampai Desember 2016 mencapai USD 18.622,26 juta atau turun 3,44 persen dibanding periode yang sama tahun 2015 yang mencapai USD 19.286,53 juta. Selama Januari sampai Desember 2016 impor migas mencapai USD 2.941,74 juta atau mengalami penurunan sebesar 18,97 persen dibanding impor migas periode yang sama tahun 2015 yang mencapai USD 3.630,64 juta. Sedangkan impor non migas Jawa Timur mencapai USD 15.680,52 juta atau mengalami peningkatan sebesar 0,16 persen dibanding periode yang sama tahun 2015 yang mencapai USD 15.655,90 juta.

Selama bulan Desember 2016 impor non migas Jawa Timur didominasi oleh Perhiasan/Permata dengan nilai USD 286,03 juta, diikuti Mesin-mesin/Peralatan Mekanik sebesar USD 191,63 juta, Besi dan Baja sebesar USD 132,97 juta, Plastik dan Barang dari Plastik sebesar USD 86,71 juta, dan Buah-buahan sebesar USD 85,70 juta.

Selama bulan Desember 2016, jika dilihat menurut negara asal impor barang, Tiongkok merupakan negara pemasok barang impor non migas Jawa Timur terbesar dengan nilai USD 466,49 juta, diikuti Singapura senilai USD 226,91 juta, dan Amerika Serikat senilai USD 102,52 juta. Kontribusi ketiganya mencapai 45,04 persen. Sementara untuk negara ASEAN asal barang impor non migas terbesar adalah Singapura dengan nilai impor mencapai USD 226,91 juta, diikuti Thailand dengan nilai USD 64,24 juta dan Malaysia dengan nilai impor mencapai USD 37,66 juta. Sedangkan untuk negara Eropa asal barang terbesar adalah Swiss dengan nilai sebesar USD 74,81 juta, diikuti Australia senilai USD 33,98 juta.

4. Investasi

Persentase Peningkatan Nilai Izin Prinsip PMA dan PMDN capaian kinerja pada Tahun 2015 sebesar 8,23% dan pada Tahun 2016 sebesar 2,71% kinerja mengalami penurunan sebesar -67,07%. Capaian minat Penanaman Modal di Jawa Timur berdasarkan Izin Prinsip pada Tahun 2016 mencapai sebesar Rp. 61,43 Trilyun, terdiri dari PMA sebesar Rp. 24,09 Trilyun dan PMDN sebesar Rp. 37,34 Trilyun tidak mencapai target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 110,12 Trilyun, PMA sebesar Rp. 60,73 Trilyun dan PMDN Rp. 49,39 Trilyun. Penurunan tersebut disebabkan karena intensitas promosi penanaman modal yang berkurang, terbatasnya lahan sehingga belum seluruhnya di Kabupaten/Kota mempersiapkan kawasan industri dalam mengantisipasi masuknya perusahaan PMA/PMDN diluar kawasan, situasi politik (*wait and see*) dan penanaman modal lebih diarahkan keluar pulau Jawa untuk mengurangi disparitas wilayah penanaman modal.

Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Realisasi Penanaman Modal PMA dan PMDN Tahun 2015 sebesar 2,11% dan Pada Tahun 2016 sebesar 1,68%, kinerja tersebut mengalami penurunan dari Tahun 2015 sebesar -1,12%. Capaian kinerja pada Tahun 2016 sebesar Rp. 72,90 Trilyun terdiri dari PMA sebesar Rp. 26,37 Trilyun dan PMDN sebesar Rp. 46,33 Trilyun. Hal tersebut disebabkan oleh :

- Masih banyaknya izin-izin lanjutan yang harus dipenuhi oleh penanam modal;

- Belum optimalnya pelayanan perizinan dan prosedur perizinan sesuai SOP di Kabupaten/Kota (izin lokasi, izin mendirikan bangunan, HO, izin pemanfaatan ruang);
- Belum optimalnya realisasi terkait izin prinsip yang diterbitkan oleh BKPM RI, Dinas Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- Tingginya UMK/UMSK pada ring I sedang produksinya masih dibawah target;
- Banyak perusahaan yang melakukan relokasi untuk menghindari UMK/UMSK yang tinggi;
- Masih banyaknya dokumen/lampiran dalam bentuk hard copy yang diperlukan untuk persyaratan mengurus izin lanjutan.

5. Pertanian

Luas panen Padi dengan target seluas 1.996.039 hektar telah terealisasi 2.253.204 hektar atau (112,88 persen) dan jika dibandingkan luas panen tahun 2015 seluas 2.152.070 hektar mengalami pertumbuhan 4,70 persen. Luas panen Jagung dengan target seluas 1.266.516 hektar telah terealisasi 1.233.090 hektar atau (97,36 persen), dan jika dibandingkan luas panen tahun 2015 seluas 1.213.654 hektar mengalami pertumbuhan 1,60 persen. Luas panen Kedelai dengan target seluas 329.977 hektar telah terealisasi 188.756 hektar mengalami pertumbuhan negatif 57,20 persen dan jika dibandingkan luas panen tahun 2015 seluas 208.067 hektar mengalami pertumbuhan negatif 9,28 persen.

Luas panen Sayuran dengan target seluas 173.281 hektar telah terealisasi 129.572 hektar atau (74,78 persen), jika dibandingkan luas panen tahun 2015 seluas 173.233 hektar mengalami pertumbuhan negatif 25,20 persen. Luas panen Cabe Besar dengan target seluas 16.987 hektar telah terealisasi 9.315 hektar atau 54,84 persen dan jika dibandingkan luas panen tahun 2015 seluas 14.454 hektar mengalami pertumbuhan negatif 35,55 persen. Luas panen Cabe rawit dengan target seluas 52.784 hektar telah terealisasi 34.327 hektar atau (65,03 persen) dan jika dibandingkan luas panen tahun 2015 seluas 53.777 hektar mengalami pertumbuhan negatif 36,17 persen. Luas panen Bawang Merah dengan target seluas 24.371 hektar

telah terealisasi 28.605 hektar atau 117,37 persen dan jika dibandingkan luas panen tahun 2015 seluas 30.784 hektar mengalami pertumbuhan negatif 7,08 persen.

Luas panen Buah–buahan dengan target seluas 72.402.696 pohon/rumpun telah terealisasi 51.402.141 pohon/rumpun atau (70,99 persen), dan jika dibandingkan luas panen tahun 2015 seluas 121.612.789 pohon/rumpun mengalami pertumbuhan negatif 57,73 persen. Luas panen Mangga dengan target seluas 9.304.367 pohon telah terealisasi 1.060.183 pohon atau (11,39 persen), dan jika dibandingkan luas panen tahun 2015 seluas 8.333.569 pohon mengalami pertumbuhan negatif 87,28 persen. Luas panen Pisang dengan target seluas 25.942.703 rumpun telah terealisasi 19.131.090 rumpun atau 73,74 persen, dan jika dibandingkan luas panen tahun 2015 seluas 21.186.844 rumpun mengalami pertumbuhan negatif 9,70 persen. Luas panen Jeruk Keprok / Siam dengan target seluas 4.395.724 pohon telah terealisasi 5.506.846 pohon atau (125,28 persen), dan jika dibandingkan luas panen tahun 2015 seluas 6.046.442 pohon mengalami pertumbuhan negatif 8,92 persen.

Luas panen Tanaman Hias dengan target seluas 5.249.356 m² telah terealisasi 3.357.766 m² atau (63,97 persen), dan jika dibandingkan luas panen tahun 2015 seluas 10.417.372 m² mengalami pertumbuhan negatif 67,77 persen. Luas panen Anggrek dengan target seluas 219.336 m² telah terealisasi 84.922 m² atau (38,72 persen), dan jika dibandingkan luas panen tahun 2015 seluas 228.813 m² mengalami pertumbuhan negatif 62,89 persen. Luas panen Krisan dengan target seluas 4.503.682 m² telah terealisasi 3.086.177 m² atau (68,53 persen), dan jika dibandingkan luas panen tahun 2015 seluas 5.741.853 m² mengalami pertumbuhan negatif 46,25 persen. Luas panen Tanaman Bio farmaka dengan target seluas 35.526.779 m² telah terealisasi 12.744.851 m² atau (35,87 persen), dan jika dibandingkan luas panen tahun 2015 seluas 105.688.447 m² mengalami pertumbuhan negatif 87,94 persen. Luas panen Temu lawak dengan target seluas 6.551.331 m² telah terealisasi 467.828 hektar atau (7,14 persen), dan jika dibandingkan luas panen tahun 2015 seluas 8.180.133 m² mengalami pertumbuhan negatif 94,28 persen. Luas panen Jahe dengan target seluas 12.030.903 m² telah

teralisasi 8.067.995 m² atau (67,06 persen) dan jika dibandingkan luas panen tahun 2015 seluas 52.922.910 m² mengalami pertumbuhan negatif 84,76 persen.

6. Perkebunan

Produksi tanaman perkebunan pada tahun 2015 adalah sebesar 1.749.707 ton dan pada tahun 2016 sebesar 1.802.302. Secara total produksi tanaman perkebunan mengalami peningkatan sebesar 3,01%, namun untuk tanaman semusim khususnya tebu dan tembakau mengalami penurunan sebagai akibat bahwa tahun 2016 merupakan tahun kemarau basah.

Nilai tambah untuk produksi tanaman perkebunan pada tahun 2015 untuk komoditi kopi sebesar 4,5 % dan kakao sebesar 3,7 % dibandingkan dengan capaian nilai tambah pada tahun 2016 mengalami kenaikan, untuk komoditi kopi sebesar 4,55 % dan kakao sebesar 3,78 %. Kenaikan tersebut tidak lepas dari kegiatan provinsi yang secara langsung memberikan bantuan alat-alat penanganan pasca panen dan pelatihan penanganannya.

Untuk peningkatan sumberdaya petani perkebunan melalui pelatihan pemberdayaan petani perkebunan pada tahun 2015 telah dilaksanakan untuk pemberdayaan terealisasi sebanyak 72 Kelompok petani perkebunan dan pada tahun 2016 dilaksanakan pemberdayaan kelompok petani perkebunan naik sebesar 5,07 % atau terealisasi sebanyak 80 kelompok petani perkebunan. Adapun pemberdayaan yang dilaksanakan mulai dari sekolah lapang pengendalian hama terpadu, sekolah lapang agribisnis dan pemberdayaan kelembagaan kelompok tani perkebunan.

7. Peternakan

Jumlah Produksi Daging pada tahun 2015 adalah sebesar 391.972 ton dan pada tahun 2016 sebesar 403.199 ton (mengalami peningkatan sebesar 2,86%). Peningkatan jumlah produksi daging pada tahun 2016 dibanding tahun 2015 merupakan hasil kebijakan dan langkah strategis, yaitu :

- Meningkatkan angka kelahiran sapi potong menjadi 1,1 juta ekor pada awal tahun 2017 diutamakan melalui optimalisasi Inseminasi Buatan (IB), mengembangkan perwilayah sumber bibit ternak galur murni, meningkatkan kualitas bibit ternak dengan pemberlakuan SKLB, sertifikasi lembaga perbibitan ternak milik Provinsi;

- Penggunaan teknologi tepat guna pengolahan pakan (mini feedmill) dengan memanfaatkan sumber daya lokal, Pengawasan mutu pakan yang beredar dan Pengembangan lahan hijauan pakan ternak;
- Pengendalian penyakit hewan menular yang berdampak ekonomis dengan mengembangkan sistem peringatan dini, peningkatan pelayanan lembaga kesehatan hewan, pengawasan lalu lintas ternak dengan menerbitkan SKKH;
- Pengendalian pemotongan ruminansia betina produktif, revitalisasi RPH, pengawasan terhadap produk hewan yang beredar.

Jumlah Produksi Telur pada tahun 2015 adalah sebesar 442.312 ton dan pada tahun 2016 sebesar 489.339 ton (mengalami peningkatan sebesar 10,63%). Peningkatan jumlah produksi telur pada tahun 2016 dibanding tahun 2015 merupakan hasil kebijakan dan langkah strategis, yaitu :

- Mengembangkan perwilayah sumber bibit ternak galur murni Jawa Timur (ayam buras dan bebek mojosari), meningkatkan kualitas bibit ternak dengan pemberlakuan SKLB dan sertifikasi lembaga perbibitan ternak milik Provinsi;
- Penggunaan teknologi tepat guna pengolahan pakan (mini feedmill) dengan memanfaatkan sumber daya lokal dan Pengawasan mutu pakan yang beredar;
- Pengendalian penyakit hewan menular yang berdampak ekonomis dengan mengembangkan sistem peringatan dini, peningkatan pelayanan lembaga kesehatan hewan, pengawasan lalu lintas ternak dengan menerbitkan SKKH;
- Pengawasan terhadap produk hewan yang beredar.

Jumlah Produksi Susu pada tahun 2015 adalah sebesar 453.577 ton dan pada tahun 2016 sebesar 490.647 ton (mengalami peningkatan sebesar 8,17%). Peningkatan jumlah produksi susu pada tahun 2016 dibanding tahun 2015 merupakan hasil kebijakan dan langkah strategis yang dilaksanakan, yaitu :

- Optimalisasi Inseminasi Buatan (IB), meningkatkan kualitas bibit ternak dengan pemberlakuan SKLB dan sertifikasi lembaga perbibitan ternak milik Provinsi;
- Penggunaan teknologi tepat guna pengolahan pakan (mini feedmill) dengan memanfaatkan sumber daya lokal, Pengawasan mutu pakan yang beredar dan Pengembangan lahan hijauan pakan ternak;

- Pengendalian penyakit hewan menular yang berdampak ekonomis dengan mengembangkan sistem peringatan dini, peningkatan pelayanan lembaga kesehatan hewan dan pengawasan lalu lintas ternak dengan menerbitkan SKKH;
- Pengendalian pemotongan ruminansia betina produktif dan pengawasan terhadap produk hewan yang beredar.